



# **L P P D**

**LAPORAN  
PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAH  
DAERAH**

# **TAHUN**

# **2018**

**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**TAHUN 2019**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan berkat dan rahmat-Nya telah diselesaikannya penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pembangunan Daerah (LPPD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018. Penyusunan LPPD ini merupakan salah satu kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD yang tertuang dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu pembangunan industri dan perdagangan Tahun 2018 guna mencapai misi dan tujuan Dinas dalam menciptakan pemerintahan yang baik (Good Governance), efisien, efektif, bersih dan responsif serta dapat dikontrol oleh semua pihak.

Penyusunan LPPD Tahun 2018 ini secara sistematis sudah diupayakan untuk disesuaikan dan mengacu kepada Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 120/3419/Pem-A tanggal 10 Desember 2018 tentang Permintaan Data Bahan Penyusunan LPPD Provinsi Kalbar TA. 2018. Dokumen LPPD yang disusun ini berdasarkan hasil kinerja Dinas Perindag pada tahun 2018 pada masa kepemimpinan Kepala Dinas Periode tahun yang bersangkutan.

Semoga LPPD Tahun 2018 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat dapat digunakan sebagaimana mestinya oleh pihak-pihak yang berkepentingan serta menjadi salah satu bahan masukan dalam pengembangan sektor Industri dan Perdagangan Kalimantan Barat kedepannya.

Pontianak, 2019

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Provinsi Kalimantan Barat,

**MUHAMMAD RIDWAN, SH., MH.**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19600310 198203 1 011

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ii</b>
<b>Daftar Gambar</b>	<b>iv</b>
<b>Daftar Tabel</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Dasar Hukum OPD .....	1
B. Bagan Struktur OPD .....	2
C. Gambaran Umum SKPD.....	3
C.1 Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar	3
C.2 Tupoksi UPTD di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar	22
D. Profil Personil SKPD .....	25
E. Kondisi Sarana dan Prasarana .....	48
<b>BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)</b>	<b>49</b>
A. Visi dan Misi SKPD.....	49
B. Tujuan & Sasaran Strategis Jangka Menengah Dinas Perindag Prov. Kalbar 2013- 201850	
C. Strategi dan Arah Kebijakan OPD .....	50
D. Program Nasional yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar .....	51
E. Standar Pelayanan Umum.....	51
E.1 Peraturan Penetapan SOP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat.	51
E.2 Jumlah SOP (Teknis) OPD	52
F. Kesesuaian Program dan Kegiatan SKPD Tahun Anggaran 2018.....	53
F.1 Ringkasan Program dan Kegiatan Pada Renstra SKPD	53
F.2 Perda Pelaksanaan Peraturan Menteri	66

<b>BAB III URUSAN DESENTRALISASI</b>	<b>67</b>
A. Ringkasan Urusan Desentralisasi .....	67
A.1 Ringkasan Urusan Dinas Perindag Prov. Kalbar	67
A.2 Ringkasan Urusan UP IPOK	67
A.3 Ringkasan Urusan UPSMB	68
B. Anggaran Belanja dan Realisasi OPD dan UPTD Dinas Perindag Prov. Kalbar ....	69
C. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal .....	87
D. Permasalahan dan Solusi .....	87
D.1 Urusan Pilihan Perindustrian	87
D.2 Urusan Pilihan Perdagangan	89
E. Hal Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan .....	90
F. Indikator Kinerja Kunci .....	90
F.1 Tataran Pengambil Kebijakan	90
F.2 Tataran Pelaksana Kebijakan;	90
F.3 Tataran Pelaksana Kebijakan (Urusan Pilihan)	94
<b>BAB IV TUGAS PEMBANTUAN</b>	<b>95</b>
<b>BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN</b>	<b>95</b>
A. Kerjasama Antar Daerah .....	95
B. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga .....	95
C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah .....	95
<b>BAB VI P E N U T U P</b>	<b>97</b>

## Daftar Gambar

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan .....	2
Gambar 2 Struktur Organisasi UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang.....	2
Gambar 3 Struktur Organisasi UPT Industri Pengolahan Makanan dan Kemasan.....	2

## Daftar Tabel

Tabel 1. Rekapitulasi Pegawai Dinas Perindag Prov. Kalbar Tahun 2018 .....	25
Tabel 2. Daftar Pegawai Dinas Perindag Prov. Kalbar Tahun 2018.....	26
Tabel 2. SOP Teknis Dinas Perindag Prov. Kalbar .....	53
Tabel 3. Kesesuaian Program dan Kegiatan Dinas Perindag Prov. Kalbar T.A. 2018 ....	53
Tabel 5. Total Anggaran dan Realisasi Belanja T.A. 2018 .....	69
Tabel 6. Uraian Anggaran dan Realisasi Belanja T.A. 2018 .....	70

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Dasar Hukum OPD**

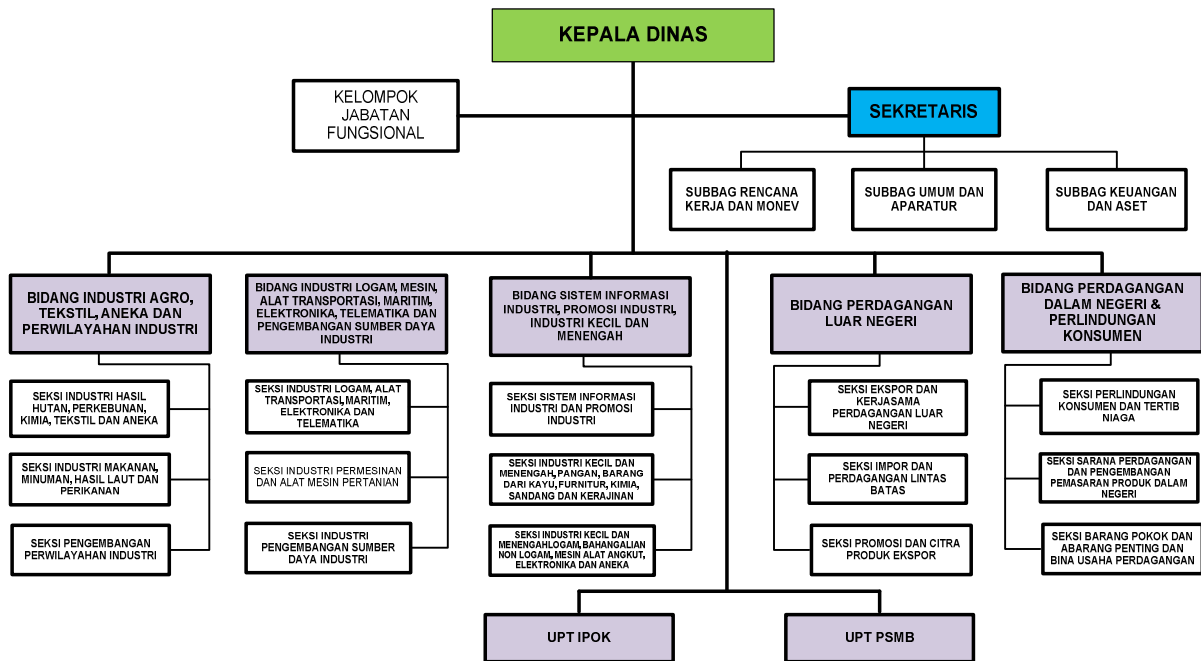
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat merupakan penggabungan dari Dinas Perindustrian Dati I Kalimantan Barat dengan Kanwil Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat, pada Tahun 2001 berkaitan dengan diterapkannya Otonomi Daerah. Dinas ini berkedudukan di Kota Pontianak dan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan serta merupakan salah satu instansi teknis yang membina sektor ekonomi di Kalimantan Barat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat didukung oleh 1 (satu) Unit Pelayanan Teknis dan 1 (satu) unit pelatihan yaitu, Unit Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (UPT - UPSMB) dan Unit Pelatihan Industri Pangan Olahan dan Kemasan (UPT-IPOK). Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat beserta unit-unit pendukungnya dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, selain didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), juga didukung oleh dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

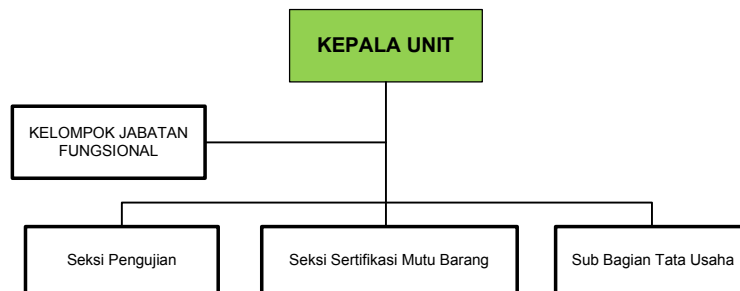
Dalam melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, mengenai telah dibentuknya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat yang dijabarkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 119 Tahun 2016 tentang Keududukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat, maka atas dasar ketentuan tersebut urusan / bidang Perindustrian dan Perdagangan menjadi tanggungjawab dan kewenangan DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

## B. Bagan Struktur OPD

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat



Gambar 2 Struktur Organisasi UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang



Gambar 3 Struktur Organisasi UPT Industri Pengolahan Makanan dan Kemasan



## C. Gambaran Umum SKPD

### C.1 Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang industri agro, kimia, tekstil, aneka dan perwilayahan industri, industri logam, mesin, alat transportasi, maritim, elektronika, telematika, dan pengembangan sumber daya industri, sistem informasi industri, promosi industri, industri kecil dan menengah, perdagangan luar negeri serta perdagangan dalam negeri dan perlindungan konsumen sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi antara lain :

- i. Perumusan kebijakan teknis di bidang industri kimia , agro dan hasil hutan; industri logam, mesin, elektronika dan aneka; perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri.
- ii. Perumusan kebijakan di bidang industri agro, kimia, tekstil, aneka dan perwilayahan industri, industri logam, mesin, alat transportasi, maritim, elektronika, telematika, dan pengembangan sumber daya industri, sistem informasi industri, promosi industri, industri kecil dan menengah, perdagangan luar negeri serta perdagangan dalam negeri dan perlindungan konsumen;
- iii. Perumusan kebijakan di bidang industri agro, kimia, tekstil, aneka dan perwilayahan industri, industri logam, mesin, alat transportasi, maritim, elektronika, telematika, dan pengembangan sumber daya industri, sistem informasi industri, promosi industri, industri kecil dan menengah, perdagangan luar negeri serta perdagangan dalam negeri dan perlindungan konsumen;
- iv. Pelaksanaan kebijakan di bidang industri agro, kimia, tekstil, aneka dan perwilayahan industri, industri logam, mesin, alat transportasi, maritim, elektronika, telematika, dan pengembangan sumber daya industri, sistem informasi industri, promosi industri, industri kecil dan menengah, perdagangan luar negeri serta perdagangan dalam negeri dan perlindungan konsumen;
- v. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang industri agro, kimia, tekstil, aneka dan perwilayahan industri, industri logam, mesin, alat transportasi, maritim, elektronika, telematika, dan pengembangan sumber daya industri, sistem informasi industri, promosi industri, industri kecil dan menengah, perdagangan luar negeri serta perdagangan dalam negeri dan perlindungan konsumen;
- vi. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang industri agro, kimia, tekstil, aneka dan perwilayahan industri, industri logam, mesin, alat transportasi, maritim, elektronika, telematika, dan pengembangan sumber daya industri,



sistem informasi industri, promosi industri, industri kecil dan menengah, perdagangan luar negeri serta perdagangan dalam negeri dan perlindungan konsumen;

- vii. Pelaksanaan administrasi di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- viii. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang Perindustrian dan Perdagangan sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

### **1) Kepala Dinas**

Mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan dinas di bidang perindustrian dan perdagangan sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Penetapan program kerja di bidang industri agro, kimia, tekstil, aneka dan perwilayahan industri, industri logam, mesin, alat transportasi, maritim, elektronika, telematika, dan pengembangan sumber daya industri, sistem informasi industri, promosi industri, industri kecil dan menengah, perdagangan luar negeri serta perdagangan dalam negeri dan perlindungan konsumen
- b. Perumusan kebijakan di bidang industri agro, kimia, tekstil, aneka dan perwilayahan industri, industri logam, mesin, alat transportasi, maritim, elektronika, telematika, dan pengembangan sumber daya industri, sistem informasi industri, promosi industri, industri kecil dan menengah, perdagangan luar negeri serta perdagangan dalam negeri dan perlindungan konsumen
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidang industri agro, kimia, tekstil, aneka dan perwilayahan industri, industri logam, mesin, alat transportasi, maritim, elektronika, telematika, dan pengembangan sumber daya industri, sistem informasi industri, promosi industri, industri kecil dan menengah, perdagangan luar negeri serta perdagangan dalam negeri dan perlindungan konsumen
- d. Pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang industri agro, kimia, tekstil, aneka dan perwilayahan industri, industri logam, mesin, alat transportasi, maritim, elektronika, telematika, dan pengembangan sumber

- daya industri, sistem informasi industri, promosi industri, industri kecil dan menengah, perdagangan luar negeri serta perdagangan dalam negeri dan perlindungan konsumen
- e. Penyelenggaraan kegiatan di bidang industri agro, kimia, tekstil, aneka dan perwilayahan industri, industri logam, mesin, alat transportasi, maritim, elektronika, telematika, dan pengembangan sumber daya industri, sistem informasi industri, promosi industri, industri kecil dan menengah, perdagangan luar negeri serta perdagangan dalam negeri dan perlindungan konsumen
  - f. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
  - g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang perindustrian dan perdagangan
  - h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang industri agro, kimia, tekstil, aneka dan perwilayahan industri, industri logam, mesin, alat transportasi, maritim, elektronika, telematika, dan pengembangan sumber daya industri, sistem informasi industri, promosi industri, industri kecil dan menengah, perdagangan luar negeri serta perdagangan dalam negeri dan perlindungan konsumen
  - i. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang industri agro, kimia, tekstil, aneka dan perwilayahan industri, industri logam, mesin, alat transportasi, maritim, elektronika, telematika, dan pengembangan sumber daya industri, sistem informasi industri, promosi industri, industri kecil dan menengah, perdagangan luar negeri serta perdagangan dalam negeri dan perlindungan konsumen.

## **2) Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris.**

Mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan dan asset, administrasi kepegawaian dan umum, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di lingkungan sekretariat
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan dan asset
- c. Pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan

- d. Pemberian dukungan pelayanan administrasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan asset di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- e. Penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai peraturan perundang-undangan
- f. Penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan dan asset serta umum dan aparatur di lingkungan Dinas sesuai peraturan perundang-undangan
- g. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat
- h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang sekretariat
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- j. Pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretaris membawahi :

***Subbag Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi*** yang bertugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan penyusunan rencana kerja, monitoring, dan evaluasi serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Subbagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi
- b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi di lingkungan dinas
- c. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat
- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi di lingkungan dinas
- e. Pelaksanaan urusan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi di lingkungan dinas sesuai peraturan perundang-undangan
- f. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Subbagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi di lingkungan dinas

- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi di lingkungan dinas
- i. Pelaksanaan fungsi lain di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi di lingkungan dinas yang diserahkan oleh sekretaris

**Subbag Umum dan Aparatur** yang bertugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang umum dan aparatur serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sub Bagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Aparatur
- b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum dan aparatur di lingkungan dinas
- c. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat
- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur
- e. Pelaksanaan urusan di bidang umum dan aparatur sesuai peraturan perundang-undangan
- f. Pengendalian dan pengawasan tugas di Subbagian Umum dan Aparatur
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur
- i. Pelaksanaan fungsi lain di bidang umum dan aparatur yang diserahkan oleh sekretaris

**Subbag Keuangan dan Asset** yang bertugas untuk mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan pengelolaan keuangan dan asset, penyusunan laporan keuangan dan asset di lingkungan dinas serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sub Bagian Keuangan dan Asset mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Asset
- b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan asset, penyusunan laporan keuangan dan asset di lingkungan dinas
- c. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat
- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang keuangan dan asset di lingkungan dinas

- e. Pelaksanaan urusan di bidang keuangan dan asset di lingkungan dinas sesuai peraturan perundang-undangan
- f. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Subbagian Keuangan dan Asset
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang keuangan dan asset di lingkungan dinas
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang keuangan dan asset di lingkungan dinas
- i. Pelaksanaan fungsi lain di bidang keuangan dan asset di lingkungan dinas yang diserahkan oleh sekretaris

### **3) Bidang Industri Agro, Kimia, Tekstil, Aneka dan Perwilayahan Industri (IAKTAPI)**

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang industri hasil hutan dan perkebunan, kimia, tekstil dan aneka serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang industri agro, kimia, tekstil, aneka dan perwilayahan industri.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang IAKTAPI mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang industri agro, kimia, tekstil, aneka dan perwilayahan industri
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang industri hasil hutan dan perkebunan, kimia, tekstil dan aneka
- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang industri makanan, minuman, hasil laut dan perikanan
- d. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan perwilayahan industri
- e. Pengkoordinasian kegiatan di bidang industri agro, kimia, tekstil, aneka dan perwilayahan industri
- f. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang industri agro, kimia, tekstil, aneka dan perwilayahan industri sesuai peraturan perundang-undangan
- g. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang industri agro, kimia, tekstil, aneka dan perwilayahan industri sesuai peraturan perundang-undangan
- h. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang industri agro, kimia, tekstil, aneka dan perwilayahan industri sesuai peraturan perundang-undangan
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang industri agro, kimia, tekstil, aneka dan perwilayahan industri

- j. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang industri agro, kimia, tekstil, aneka dan perwilayahan industri;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang industri agro, kimia, tekstil, aneka dan perwilayahan industri sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang IAKTA-PI membawahi :

***Seksi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, Kimia, Tekstil dan Aneka*** yang bertugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Seksi industri Hasil Hutan, Perkebunan, Kimia, Tekstil dan Aneka mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan di Seksi Industri Hasil Hutan, Perkebunan, Kimia, Tekstil dan Aneka;
- b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang industri Hasil Hutan, Perkebunan, Kimia, Tekstil dan Aneka;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang Industri Hasil hutan, Perkebunan, Kimia, Tekstil dan Aneka;
- d. Pelaksanaan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Industri Hasil Hutan, Perkebunan, Kimia, Tekstil dan Aneka sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Industri Hasil Hutan, Perkebunan, Kimia, Tekstil dan Aneka;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang Industri Hasil Hutan, Perkebunan, Kimia, Tekstil dan Aneka;
- g. Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Industri Hasil Hutan, Perkebunan, Kimia, Tekstil dan Aneka;
- h. Pelaksanaan fungsi lain di bidang Industri Hasil Hutan, Perkebunan, Kimia, Tekstil dan Aneka yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

***Seksi Industri Makanan, Minuman, Hasil Laut dan Perikanan*** yang bertugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang Industri Makanan, Minuman, Hasil Laut dan Perikanan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Industri Makanan, Minuman, Hasil Laut dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Industri Makanan, Minuman, Hasil Laut dan Perikanan;

- b. Pengumpulan, Pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Industri Makanan, Minuman, Hasil Laut dan Perikanan;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang Industri Makanan, Minuman, Hasil Laut dan Perikanan;
- d. Pelaksanaan urusan Pemerintahan di bidang Industri Makanan, Minuman,, Hasil Laut dan Perikanan sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Industri Makanan, Minuman, Hasil Laut dan Perikanan;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang Industri Makanan, Minuman, Hasil Laut dan Perikanan;
- g. Pelaksanaan Monitoring dan Penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Industri Makanan, Minuman, Hasil Laut dan Perikanan.
- h. Pelaksanaan fungsi lain di bidang Industri Makanan, Minuman, Hasil Laut dan Perikanan.

***Seksi Pengembangan Perwilayahan Industri*** yang bertugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan di pengembangan perwilayahan industri serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Seksi pengembangan perwilayahan industri mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi pengembangan perwilayahan industri;
- b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan perwilayahan industri;
- c.
- d. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan perwilayahan industri;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pengembangan perwilayahan industri;
- f. Pelaksanaan urusan Pemerintahan di bidang pengembangan perwilayahan industri sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. Pengendalian dan Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan perwilayahan industri;
- h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengembangan perwilayahan industri;
- i. Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan Perwilayahan industri;

- j. Pelaksanaan tugas lain di bidang pengembangan perwilayahan industri yang diserahkan oleh kepala bidang.

#### **4) Bidang Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Maritim, Elektronika, Telematika, dan Pengembangan Sumber Daya Industri (ILMATMET-PSDI).**

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, maritim, Elektronika, Telematika, dan pengembangan Sumber daya industri serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang industri logam, Mesin, Alat Transportasi, Maritim, Elektronika, Telematika, dan Pengembangan Sumber Daya industri.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, bidang ILMATMET-PSDI mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja di bidang industri logam, mesin, alat transportasi, maritim, elektronika, telematika dan pengembangan Sumber daya industri;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang industri logam, mesin, alat transportasi, maritim, elektronika, dan telematika;
- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang industri permesinan dan alat mesin Pertanian;
- d. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan Sumber daya industri;
- e. Pengkoordinasian kegiatan di bidang industri logam, mesin, alat transportasi, maritim, elektronika, telematika, dan pengembangan Sumber daya industri;
- f. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang industri logam, mesin, alat transportasi, maritim, elektronika, telematika, dan pengembangan sumber daya industri sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang industri logam, mesin, alat transportasi, maritim, elektronika, telematika dan pengembangan sumber daya industri sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang industri logam, mesin, alat transportasi, maritim, elektronika, telematika, dan pengembangan sumber daya industri sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang industri logam, mesin, alat transportasi, maritim elektronika, telematika, dan pengembangan sumber daya industri;



- j. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang industri logam, mesin, alat transportasi, maritim, elektronika, telematika, dan pengembangan sumber daya industri;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas di bidang industri logam, mesin, alat transportasi, maritim, elektronika, telematika, dan pengembangan sumber daya industri sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala bidang ILMATMET-PSDI membawahi:

**Seksi Industri Logam, Alat Transportasi, Maritim, Eletronika dan telematika** yang bertugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang industri logam, alat transportasi, maritim, elektronika dan telematika serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Seksi industri logam, alat, transportasi, maritim, elewkrtonika dan telematika mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Industri logam, Alat Transportasi, maritim, elektronika dan telematika;
- b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang industri logam, Alat transportasi, maritim, elektronika dan telematika;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang industri logam, alat transportasi, maritim, elektronika dan telematika;
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang industri logam, alat transportasi, maritim, elektronika dan telematika sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang industri logam, alat transportasi, maritim, elektronika dan telematika;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang industri logam, alat transportasi, maritim, elektronika dan telematika;
- g. Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang industri logam, alat transportasi, maritim, elektronika dan telematika;
- h. Pelaksanaan tugas lain di bidang industri logam, alat transportasi, maritim, elektronika dan telematika yang diserahkan oleh kepala bidang;

**Seksi Industri Permesinan dan alat mesin pertanian** yang bertugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang industri Permesinan dan alat mesin pertanian serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Seksi industri permesinan dan alat mesin pertanian mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Industri permesinan dan alat mesin Pertanian;
- b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang industri permesinan dan alat mesin pertanian;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang industri permesinan dan alat mesin pertanian;
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang industri permesinan dan alat mesin pertanian sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang industri permesinan dan alat mesin pertanian;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang industri permesinan dan alat mesin pertanian;
- g. Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang industri permesinan dan alat mesin pertanian;
- h. Pelaksanaan tugas lain di bidang industri permesinan dan alat mesin pertanian yang diserahkan oleh kepala bidang.

**Seksi Pengembangan Sumber Daya Industri** yang bertugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan di bidang pengembangan Sumber Daya industri serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Pengembangan Sumber Daya industri Hasil hutan, Perkebunan, Kimia, tekstil dan aneka mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengembangan Sumber Daya Industri;
- b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber Daya industri;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pengembangan Sumber Daya Industri;
- d. Pelaksanaan urusan Pemerintahan di bidang Pengembangan Sumber Daya Industri sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pengembangan Sumber Daya Industri;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengembangan Sumber Daya industri;
- g. Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pengembangan Sumber Daya Industri;

- h. Pelaksanaan tugas lain di bidang Pengembangan Sumber Daya Industri yang diserahkan oleh kepala bidang.

**5) Bidang Sistem Informasi Industri, Promosi Industri, Industri Kecil dan Menengah (SIPI-IKM).**

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang Sistem informasi Industri, Promosi Industri, Industri Kecil dan Menengah pangan, barang dari kayu, furnitur, kimia sandang dan kerajinan, Industri Kecil dan Menengah Logam, bahan galian non logam, mesin alat angkut, elektronika dan aneka serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang Sistem Informasi industri, Promosi Industri, Industri Kecil dan Menengah;

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang SIPI-IKM mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang Sistem Informasi Industri, Promosi Industri, Industri Kecil dan Menengah;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Sistem informasi Industri dan promosi Industri;
- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang industri Kecil dan Menengah Pangan, barang dari kayu, furnitur, kimia, sandang, dan kerajinan;
- d. Penyiapan bahan dan Perumusan kebijakan teknis di bidang Industri Kecil dan Menengah logam, bahan galian non logam, mesin, alat angkut, elektronika, dan aneka;
- e. Pengkoordinasian di bidang Sistem Informasi industri, Promosi Industri, Industri Kecil dan Menengah;
- f. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Sistem Informasi Industri, Promosi Industri, Industri Kecil dan Menengah sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Sistem Informasi Industri, Promosi Industri, Industri Kecil Menengah sesuai peraturan perundang-undangan ;
- h. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang Sistem informasi industri, Promosi Industri, Industri Kecil dan Menengah sesuai dengan poeraturan dan perundang-undangan;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang Sistem Informasi Industri, Promosi industri, Industri Kecil dan Menengah;
- j. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dcu bidang Sistem Informasi Industri, Promosi Industri, Industri Kecil dan Menengah;

- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang Sistem Informasi Industri, Promosi Industri, Industri Kecil dan Menengah sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang SIPI-IKM membawahi:

**Seksi Sistem Informasi Industri dan Promosi Industri** yang bertugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang pengawasan, pengujian barang beredar dan jasa serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Sistem Informasi Industri dan Promosi Industri mempunyai fungsi;

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Sistem informasi Industri dan promosi Industri;
- b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Sistem Informasi Industri dan Promosi Industri;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang Sistem Informasi Industri dan Promosi Industri;
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Sistem Informasi Industri dan Promosi Industri sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. Pengendalian dan Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Sistem Informasi Industri dan Promosi Industri;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang Sistem Informasi Industri dan Promosi Industri;
- g. Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Sistem Informasi Industri dan Promosi Industri;
- h. Pelaksanaan tugas lain di bidang Sistem Informasi Industri dan Promosi Industri yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

**Seksi Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu, Furnitur, Kimia, Sandang, dan Kerajinan** yang bertugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang dari kayu, Furnitur, Kimia, Sandang, dan Kerajinan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang dari Kayu, Furnitur, Kimia, Sandang, dan Kerajinan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Industri Kecil dan Menengah Pangan, barang dari kayu, furnitur, Kimia, Sandang, dan Kerajinan;

- b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Industri Kecil dan Menengah pangan, barang dari kayu, furnitur, Kimia, Sandang, dan Kerajinan;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang industri Kecil dan Menengah Pangan, barang dari kayu, furnitur, Kimia, Sandang, dan kerajinan;
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang dari kayu, furnitur, Kimia, Sandang, dan kerajinan sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang industri Kecil dan Menengah Pangan, barang dari Kayu, Furnitur, Kimia, Sandang dan Kerajinan;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang industri kecil dan menengah pangan, barang dari kayu, furnitur, Kimia, Sandang, dan kerajinan;
- g. Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang industri kecil dan Menengah pangan, barang dari kayu, furnitur, kimia, Sandang, dan kerajinan;
- h. Pelaksanaan tugas lain di bidang industri kecil dan Menengah pangan, barang dari kayu, furnitur, kimia, Sandang, dan kerajinan yang diserahkan oleh kepala bidang.

***Seksi Industri Kecil dan Menengah logam, bahan galian non logam, mesin, alat angkut, elektronika, dan aneka*** yang bertugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang industri Kecil dan Menengah logam, bahan galian non logam, mesin, alat angkut, elektronika, dan aneka serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Industri Kecil dan Menengah logam, bahan galian non logam, mesin, alat angkut, elektronika, dan aneka mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi industri Kecil dan menengah logam, bahan galian non logam, mesin, alat angkut, elektronika, dan aneka;
- b. Pengumpulan pengolahan bahan dan perumusxan kebijakan teknis di bidang Industri kecil dan Menengah logam, bahan galian non logam, mesin, alat angkut, elektronika, dan aneka;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang Industri Kecil dan Menengah logam, bahan galian non logam, mesin, alat angkut, elektronika, dan aneka;
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Industri Kecil dan Menengah logam, bahan galian non logam, mesin, alat angkut, elektronika dan aneka sesuai peraturan perundang-undangan;

- e. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang industri kecil dan Menengah logam, bahan galian non logam, mesin, alat angkut, elektronika dan aneka;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang industri Kecil dan Menengah logam, bahan galian non logam, mesin, alat angkut, elektronika, dan aneka;
- g. Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang industri kecil dan Menengah logam, bahan galian non logam, mesin, alat angkut, elektronika, dan aneka;
- h. Pelaksanaan tugas lain di bidang industri Kecil dan Menengah logam, bahan galian non logam, mesin, alat angkut, elektronika, dan aneka yang diserahkan oleh kepala bidang.

## 6) Bidang Perdagangan Luar Negeri (PLN)

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang ekspor dan kerjasama perdagangan luar negeri, impor dan perdagangan lintas batas, promosi dan citra produk ekspor serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perdagangan luar negeri.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, bidang PLN mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang Perdagangan luar negeri;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang ekspor dan kerjasama perdagangan luar negeri;
- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang impor dan perdagangan lintas batas;
- d. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang promosi dan citra produk ekspor;
- e. Pengkoordinasian di bidang Perdagangan luar negeri;
- f. Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perdagangan luar negeri sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perdagangan luar negeri sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perdagangan luar negeri sesuai peraturan dan perundang-undangan;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang perdagangan luar negeri;
- j. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang perdagangan luar negeri;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang perdagangan luar negeri sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala bidang PLN membawahi:

**Seksi Ekspor dan Kerjasama Perdagangan Luar Negeri** yang bertugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang ekspor dan Kerjasama perdagangan luar negeri serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Seksi ekspor dan Kerjasama perdagangan luar negeri mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi ekspor dan kerjasama perdagangan luar negeri
- b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang ekspor dan kerjasama perdagangan luar negeri ;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang ekspor dan kerjasama perdagangan luar negeri;
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ekspor dan kerjasama perdagangan luar negeri sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang ekspor dan kerjasama perdagangan luar negeri;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang ekspor dan kerjasama perdagangan luar negeri;
- g. Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang ekspor dan kerjasama perdagangan luar negeri;
- h. Pelaksanaan tugas lain di bidang ekspor dan kerjasama perdagangan luar negeri yang diserahkan oleh Kepala bidang.

**Seksi Impor dan Perdagangan Lintas Batas** yang bertugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang impor dan perdagangan Lintas batas serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Seksi Impor dan Perdagangan Lintas Batas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Impor dan Perdagangan Lintas Batas;
- b. Pengumpulan, Pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang impor dan perdagangan lintas batas;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang impor dan perdagangan lintas batas;
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang impor dan perdagangan lintas batas sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang impor dan perdagangan lintas batas;

- f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang impor dan perdagangan lintas batas;
- g. Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang impor dan Perdagangan Lintas batas;
- h. Pelaksanaan tugas lain di bidang impor dan Perdagangan Lintas batas yang diserahkan oleh Kepala bidang.

**Seksi Promosi dan Citra Produk Ekspor** yang bertugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan di bidang Promosi dan Citra Produk Ekspor serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Seksi Promosi dan Citra Produk Ekspor mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi promosi dan Citra Produk Ekspor;
- b. Pengumpulan, Pengolahan bahan dan Perumusan kebijakan teknis di bidang promosi dan Citra Produk Ekspor;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang Promosi dan Citra Produk Ekspor;
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Promosi dan Citra Produk ekspor sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Promosi dan Citra produk ekspor;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang Promosi dan Citra produk ekspor;
- g. Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang promosi dan citra produk ekspor;
- h. Pelaksanaan tugas lain di bidang promosi dan citra produk ekspor yang diserahkan oleh Kepala bidang.

## 7) Bidang Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen (PDN dan PK)

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga, sarana perdagangan dan pengembangan pemasaran produk dalam negeri, barang pokok dan barang penting dan bina usaha perdagangan serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang Perdagangan dalam negeri dan Perlindungan konsumen.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, bidang PDN dan PK mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja di bidang Perdagangan dalam negeri dan perlindungan konsumen;



- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga;
- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang sarana perdagangan dan pengembangan pemasaran produk Dalam Negeri;
- d. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di barang pokok dan barang penting dan bina usaha Perdagangan;
- e. Pengkoordinasian di bidang Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan konsumen;
- f. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang Perdagangan dalam negeri dan perlindungan konsumen sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perdagangan dalam negeri dan perlindungan Konsumen sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang Perdagangan dalam negeri dan perlindungan konsumen;
- j. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang perdagangan dalam negeri dan perlindungan konsumen;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang perdagangan dalam negeri dan perlindungan konsumen sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kepala bidang PDN dan PK membawahi:

**Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga** yang bertugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang perlindungan Konsumen dan tertib niaga serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja kegiatan Seksi perlindungan konsumen dan Tertib niaga
- b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga;
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga sesuai peraturan perundang-undangan;

- e. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga;
- g. Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga;
- h. Pelaksanaan tugas lain di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga yang diserahkan oleh kepala bidang.

***Seksi Sarana Perdagangan dan Pengembangan Pemasaran Produk Dalam Negeri*** yang bertugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang sarana Perdagangan dan pengembangan pemasaran produk dalam negeri serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Sarana Perdagangan dan Pengembangan Pemasaran Produk dalam negeri mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Sarana Perdagangan dan pengembangan Pemasaran Produk dalam negeri;
- b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Sarana Perdagangan dan Pengembangan Pemasaran produk dalam negeri;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang sarana perdagangan dan pengembangan pemasaran produk dalam negeri;
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang sarana perdagangan dan pengembangan pemasaran produk dalam negeri sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang sarana perdagangan dan pengembangan pemasaran produk dalam negeri;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang sarana perdagangan dan pengembangan pemasaran produk dalam negeri;
- g. Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang sarana perdagangan dan pengembangan pemasaran produk dalam negeri;
- h. Pelaksanaan tugas lain di bidang sarana perdagangan dan pengembangan pemasaran produk dalam negeri yang diserahkan oleh kepala bidang.

***Seksi Barang Pokok dan Barang Penting dan Bina Usaha Perdagangan*** yang bertugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang barang

pokok dan barang penting dan bina usaha perdagangan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Seksi barang pokok dan barang penting dan bina usaha perdagangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi barang pokok dan barang penting dan Bina Usaha Perdagangan;
- b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang barang pokok dan barang penting dan bina usaha perdagangan;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang barang pokok dan barang penting dan bina usaha perdagangan;
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang barang pokok dan barang penting dan bina usaha perdagangan sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang barang pokok dan barang penting dan bina usaha perdagangan;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang barang pokok dan barang penting dan bina usaha Perdagangan;
- g. Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang barang pokok dan barang penting dan bina usaha perdagangan;
- h. Pelaksanaan tugas lain di bidang barang pokok dan barang penting dan bina usaha perdagangan yang diserahkan oleh kepala bidang.

## **C.2 Tupoksi UPTD di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar**

### **1) *Unit Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang (UPSMB)***

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat nomor 25 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang (UPSMB) Provinsi Kalimantan Barat, UPSMB merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Dinas Perindag Prov. Kalbar mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan-kegiatan teknis Disperindag dibidang :

1. Pengawasan, pengujian dan sertifikasi mutu barang;
2. Memberikan bimbingan teknis kepada eksportir, eksportir produsen dan dunia usaha lainnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, UPSMB mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di lingkungan UPSMB;

- b. Perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan program, monitoring, evaluasi, aparatur dan umum serta pengelolaan keuangan dan asset di lingkungan UPSMB;
- c. Pengujian mutu barang untuk keperluan sertifikasi, impor dan barang beredar di pasaran;
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis kalibrasi;
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis, penyuluhan dan konsultasi teknis di bidang peningkatan mutu barang;
- f. Penilikan mutu barang terhadap eksportir, eskportir produsen;
- g. Penelitian dan pengembangan metode uji;
- h. Pelaksanaan koordinasi yang berhubungan dengan kegiatan pengawasan dan sertifikasi mutu barang;
- i. Pembinaan dan pengawasan kegiatan jaminan mutu dan pengujian yang kewenangannya diserahkan oleh Kepala Dinas;
- j. Pembinaan dan pengawasan kegiatan Bimbingan Teknis dan Kalibrasi yang kewenangannya diserahkan oleh Kepala Dinas;
- k. Pengendalian pelaksanaan tugas di bidang pengawasan dan sertifikasi mutu barang;
- l. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang Pengawasan dan Serfikasi Mutu Barang;
- m. Pelaksanaan tugas lain di bidang pengawasan dan sertifikasi mutu barang yang diserahkan Kepala Dinas.

## **2) *Unit Pelatihan Industri Pangan Olahan dan Kemasan (UP-IPOK)***

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2001 tanggal 16 Februari 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat dan Perubahannya dalam Perda No. 3 tahun 2002, serta dengan mengacu pada SK Gubernur Kalbar No. 79 tahun 2018 tentang pembentukan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Industri Pangan Olahan dan Kemasan Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas di bidang pelatihan industri Pangan Olahan dan Kemasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Unit Pelatihan Industri Pangan Olahan dan Kemasan Provinsi Kalimantan Barat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di lingkungan UP-IPOK
- b. Perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan program, monitoring, evaluasi, aparatur dan umum, serta pengelolaan keuangan dan asset di lingkungan UP-IPOK.
- c. Pelaksanaan kegiatan pelatihan keterampilan teknis dibidang industri Pangan Olahan dan Kemasan.

- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga pelatihan lainnya dan masyarakat profesional (LSM, Perguruan Tinggi, Konsultan, Dunia Usaha, dan Balitbang) di dalam negeri dan di luar negeri dalam operasional unit
- e. Pelaksanaan bimbingan pasca pelatihan dalam pengembangan usaha
- f. Pelaksanaan koordinasi yang berhubungan dengan kegiatan pelatihan usaha kecil dan menengah.
- g. Pembinaan dan pengawasan kegiatan pelatihan keterampilan teknis di bidang industri Pangan Olahan dan Kemasan yang kewenangannya diserahkan oleh Kepala Dinas
- h. Pembinaan dan pengawasan kegiatan bimbingan pasca pelatihan dalam pengembangan usaha yang kewenangannya diserahkan oleh Kepala Dinas
- i. Pengendalian pelaksanaan tugas di bidang pelatihan industri Pangan Olahan dan Kemasan.
- j. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas dibidang pelatihan industri Pangan Olahan dan Kemasan.
- k. Pelaksanaan tugas lain dibidang pelatihan industri Pangan Olahan dan Kemasan yang diserahkan Kepala Dinas.

#### D. Profil Personil SKPD

Jumlah keseluruhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 116 orang pada 31 Desember 2018, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1. Rekapitulasi Pegawai Dinas Perindag Prov. Kalbar Tahun 2018

NO	BIDANG UPT	JUMLAH	ESELON			PANGKAT/GOLONGAN				TINGKAT PENDIDIKAN					
			II	III	IV	I	II	III	IV	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD
1	DINAS PERINDAG	84	1	4	19	0	10	64	10	13	28	8	35	0	0
2	UPSMB	18	0	1	2	0	4	13	1	1	10	-	7	0	0
3	UP IPOK	14	0	-	3	0	2	12	-	1	5	1	7	0	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>116</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>89</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>43</b>	<b>9</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sumber : Dinas Perindag Prov. Kalbar per 31 Desember 2018

Tabel 2. Daftar Pegawai Dinas Perindag Prov. Kalbar Tahun 2018

NO	NAMA LENGKAP	GOL.RUANG	JABATAN SEKARANG	PENDIDIKAN UMUM TERAKHIR	DIKLAT TERAKHIR		JNS KEL	AGAMA
	N I P	TMT	TMT		STRUKTURAL	FUNGSIONAL		
	TEMPAT DAN TGL.LAHIR							
<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>								
1	MUHAMMAD RIDWAN, SH,MH	IV/d	KEPALA PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	S2 / MAGISTER / MASTER	DIKLATPIM TK. II	Penilaian Angka Kredit Jafung - Auditor	L	Islam
	19600310 198203 1 011	04/01/2018						
	PONTIANAK, 10-03-1960		(Eselon II. A) TMT.03-01- 2017					
<b>SEKRETARIAT</b>								
2	Ir.Hj. YENNY SUSILAWATI	IV/b	SEKRETARIS	SARJANA	DIKLATPIM TK. III		P	ISLAM
	19640601 199103 2 001	10/01/2013	(Eselon III. A) TMT.16- 01-2017					
	BANDUNG, 1-6-1964							
<b>SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR</b>								
3	MARGARETTA NURSIANA, SH	III/d	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR	SARJANA	DIKLATPIM TK. IV		P	KATHOLIK
	19690609 199006 2 001	04/01/2014	(Eselon IV. A) TMT.06- 02-2017					
	PONTIANAK, 09-06-1969							
4	MARTINI, S.Sos	III/d	ARSIPARIS PENYELIA	SARJANA	ADUM	DIKLAT PENYEGARAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS	P	ISLAM
	19630802 198302 2 001	10/01/2009	TMT.01-10-2005					
	PONTIANAK, 2-8-1963							
5	SUSILA ERNAWATI,S.Sos	III/c	ANALIS SDM APARATUR	SARJANA	ANALIS KEPEGWAIAN		P	ISLAM
	19700710 199203 2 002	10/01/2016	TMT.08-10-2018					
	PONTIANAK, 10-7-1970							

NO	NAMA LENGKAP	GOL.RUANG	JABATAN SEKARANG	PENDIDIKAN UMUM TERAKHIR	DIKLAT TERAKHIR		JNS KEL	AGAMA
	N I P	TMT	TMT		STRUKTURAL	FUNGSIONAL		
	TEMPAT DAN TGL.LAHIR							
6	MARTHA RINI	III/b	PENGADMINISTRASI UMUM	SLTA KEJURUAN	ADUM		P	ISLAM
	19620323 198502 2 002	04/01/2005	TMT.08-10-2018					
	SINGKAWANG, 23-3-1962							
7	KARTINI	III/b	PENGADMINISTRASI UMUM	SLTA KEJURUAN			P	ISLAM
	19620421 198203 2 010	04/01/2001	TMT.08-10-2018					
	PONTIANAK, 21-4-1962							
8	M. IWAN SULESMANA	III/b	ANALIS PERENCANAAN SDM APARATUR	SLTA UMUM			L	ISLAM
	19650430 198803 1 009	10/01/2009	TMT.08-10-2018					
	PONTIANAK, 30-4-1965							
9	RIRIN ROHMAWATI,S,STP	III/a	ANALIS PERENCANAAN SDM APARATUR	DIPLOMA IV		PENGEMBANGAN DIRI APARATUR		
	19930802 201609 2 001	01/09/2018	TMT.08-10-2018					
	PONOROGO, 02-08-1993							
10	ALI JAMIN	II/c	PENGADMINISTRASI UMUM	SLTA UMUM		PENATAAN ARSIP AKTIF	L	ISLAM
	19671120 200701 1 015	04/01/2015	TMT.08-10-2018					
	PONTIANAK, 20-11-1967							
<b>SUB BAGIAN RENCANA KERJA DAN MONITORING EVALUASI</b>								
11	DIAN FERRIANSYAH, SP, M.Sc	III/d	PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN	S2 / MAGISTER / MASTER	DIKLAT PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIP GENDER	DIKLAT PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ( RENSTRA PD )	L	ISLAM
	19811006 200604 1 009	04/01/2018	TMT.08-10-2018					
	MALANG, 6-10-1981							



NO	NAMA LENGKAP	GOL.RUANG	JABATAN SEKARANG	PENDIDIKAN UMUM TERAKHIR	DIKLAT TERAKHIR		JNS KEL	AGAMA
	N I P	TMT	TMT		STRUKTURAL	FUNGSIONAL		
	TEMPAT DAN TGL.LAHIR							
12	MARSELINA LIN, SE	III/c	KEPALA SUBBAG RENJA DAN MONEV	S1		PELATIHAN TELAHAH STAF PARIPURNA	P	
	19700601 199903 2 003							
	NANGA SUNGAI, 01 - 06 - 1970	01-10 - 2016	( ESELON IV.A ) TMT.					
13	KARMILA SARI, S.Sos	III/b	ANALIS PELAPORAN	SARJANA		DIKLAT ARSIP DIMANIS	P	ISLAM
	19770424 201101 2 002	04/01/2015						
	PONTIANAK, 24-4-1977							
14	ADITYA PERMANA, A.Md	II/d	PENGELOLA EVALUASI DAN MONITORING	DIPLOMA III		DIKLAT PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ( RENSTRA PD )	L	ISLAM
	19880825 201402 1 001	04/01/2018	TMT.08-10-2018					
	PONTIANAK, 25-8-1988							
15	HERMAWAN	II/c	ARSIPARIS TERAMPIL	SLTA UMUM		DIKLAT PENATAAN ARSIP AKTIF	L	ISLAM
	19710118 200604 1 008	04/01/2014	TMT 01 JUL 2016					
	SINGKAWANG, 18-1-1971							
<b>SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASSET</b>								
16	HERCULANUS	III/d	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASSET	SARJANA MUDA		Diklat Akuntansi Keuangan	L	KATHOLIK
	19670701 198710 1 001	10/01/2015	(Eselon IV. A) TMT.16- 01-2017			Diklat Akuntansi Pemerintahan		
	PONTIANAK, 1-7-1967							
17	ZULKARNAIN,SH	III/c	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	S1			L	ISLAM
	19711205 199303 1 004	10/01/2017						
	PONTIANAK, 5-12-1971		TMT.08-10-2018					

NO	NAMA LENGKAP	GOL.RUANG	JABATAN SEKARANG	PENDIDIKAN UMUM TERAKHIR	DIKLAT TERAKHIR		JNS KEL	AGAMA
	N I P	TMT	TMT		STRUKTURAL	FUNGSIONAL		
	TEMPAT DAN TGL.LAHIR							
18	SAMSU	III/b	PENGELOLA KEUANGAN	SLTA KEJURUAN			L	ISLAM
	19640810 198703 1 016	04/01/2014	TMT.08-10-2018					
	PONTIANAK, 10-8-1964							
19	SUYATI	III/b	VERIFIKATOR KEUANGAN	SLTA UMUM		LATIHAN TENAGA KEARSIPAN	P	ISLAM
	19670503 199011 2 001	04/01/2011	TMT.08-10-2018					
	PONTIANAK, 3-5-1967							
20	ETTY	III/b	BENDAHARA	SLTA KEJURUAN		Diklat Bendaharawan Daerah	P	ISLAM
	19700204 199202 2 001	04/01/2011	TMT.08-10-2018					
	PONTIANAK, 4-2-1970							
21	ROILAH, SE	III/c	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	SARJANA			P	ISLAM
	19790401 201001 2 007	04/01/2018	TMT.08-10-2018					
	CILACAP, 1-4-1979							
22	RIKA PUTRIANA, A.Md	II/d	BENDAHARA	DIPLOMA III			P	ISLAM
	19890309 201101 2 001	04/01/2015	TMT.08-10-2018					
	PONTIANAK, 9-3-1989							
<b>BIDANG INDUSTRI AGRO DAN KIMIA TEKSTIL ANEKA PERWILAYAHAN INDUSTRI</b>								
23	Ir. UNTAT DHARMAWAN,M.Si		KEPALA BIDANG INDUSTRI AGRO DAN KIMIA ,TEKSTIL,ANEKA DAN PERWILAYAHAN INDUSTRI	S2 / MAGISTER / MASTER	SPAMA ( 2000 )	ISO-140001 - 2000	L	ISLAM
	1621011 198909 1 0019	Pembina Tk I	(Eselon III. A) TMT.16- 01-2017					
	Jakarta, 11 Oktober 1962	04/01/2009						
<b>SEKSI INDUSTRI MAKANAN, MINUMAN, HASIL LAUT DAN PERIKANAN</b>								

NO	NAMA LENGKAP	GOL.RUANG	JABATAN SEKARANG	PENDIDIKAN UMUM TERAKHIR	DIKLAT TERAKHIR		JNS KEL	AGAMA
	N I P	TMT	TMT		STRUKTURAL	FUNGSIONAL		
	TEMPAT DAN TGL.LAHIR							
24	AJIE TIRTA KUSUMA, ST, M.Ec.Dev	III/d	KEPALA SEKSI INDUSTRI MAKANAN, MINUMAN, HASIL LAUT DAN PERIKANAN BIDANG IAKTAPI	S2 / MAGISTER / MASTER	DIKLAT PIM		L	ISLAM
	19820913 200604 1 010	04/01/2018	(Eselon IV. A) TMT.16- 01-2017					
	PONTIANAK, 15-9-1982							
25	WINATA TARDEN, SE	III/c	ANALIS INDUSTRI	SARJANA		DIKLAT PENYUSUNAN RENSTRA SKPD -UGM - 2012	L	ISLAM
	19841223 101001 1 010	Penata	TMT.08-10-2018					
	PONTIANAK, 23 - 12 - 1984	04/01/2018						
<b>SEKSI INDUSTRI HASIL HUTAN DAN PERKEBUNAN,KIMIA,TEKSTIL DAN ANEKA</b>								
26	YOISE ANRA, SP	III/d	KEPALA SEKSI INDUSTRI HASIL HUTAN, PERKEBUNAN, KIMIA, TEKSTIL DAN ANEKA PADA BIDANG IAKTAPI	SARJANA			P	ISLAM
	19780131 200604 2 004	04/01/2018	(Eselon IV. A) TMT.16- 01-2017					
	PADANG PANJANG, 31-1-1978							
27	VIVI MASITHA, A.Md	III/a	ANALIS INDUSTRI	SARJANA MUDA		ANALIS KEPEGAWAIAN	P	ISLAM
	19850108 200903 2 001	04/01/2017	TMT.08-10-2018					
	PONTIANAK, 8-1-1985							
28	PARNINGOTAN	II/c	PENELAAH DATA PENGOLAHAN INDUSTRI PRIMER	SLTA UMUM		PENGEMBANGAN DIRI APARATUR	L	KRISTEN
	19660223 200901 1 001	04/01/2017	TMT.08-10-2018					
	PONTIANAK, 23-2-1966							
<b>SEKSI PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI</b>								

NO	NAMA LENGKAP	GOL.RUANG	JABATAN SEKARANG	PENDIDIKAN UMUM TERAKHIR	DIKLAT TERAKHIR		JNS KEL	AGAMA
	N I P	TMT	TMT		STRUKTURAL	FUNGSIONAL		
	TEMPAT DAN TGL.LAHIR							
29	IDA SURYA SYAFAR NINGSIH, SH	III/d	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI	SARJANA	DIKLATPIM TK. IV		P	ISLAM
	19660604 199403 2 010	04/01/2005	(Eselon IV. A) TMT.16- 01-2017					
	PONTIANAK, 4-6-1966							
30	MIRNAWATI, SH	III/d	PENGELOLA KEUANGAN	SARJANA			P	ISLAM
	19640301 198303 2 004	10/01/2017	TMT.08-10-2018					
	PONTIANAK, 01-03-1964							
31	FITRIANA, SE	III/c	ANALIS KAWASAN INDUSTRI	SARJANA			P	
	19671228 199403 2 006	10/01/2017	TMT.08-10-2018					
	PONTIANAK, 28-12-1967							
32	SLAMET RIADI	III/b	PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	SLTA UMUM			L	ISLAM
	19680908 199103 1 011	04/01/2018	TMT.08-10-2018					
	NGABANG, 8-9-1968							
<b>BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>								
			KEPALA BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					
<b>SEKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA</b>								
33	FAIROUS CHAZANA ,SN. SE,MM		KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA	S2 / MAGISTER / MASTER	ADUM	DIKLAST SERTIFIKASI JAFUNG PENELITI	P	ISLAM
	19640522 199203 2 004	IV/a	04/01/2006					

NO	NAMA LENGKAP	GOL.RUANG	JABATAN SEKARANG	PENDIDIKAN UMUM TERAKHIR	DIKLAT TERAKHIR		JNS KEL	AGAMA
	N I P	TMT	TMT		STRUKTURAL	FUNGSIONAL		
	TEMPAT DAN TGL.LAHIR							
34	PONTIANAK, 22 - 05 - 1964 DWI YOGA DIANA FITRI, SE		PENYUSN RENCANA PENGAMANAN DAN PERLINDUNGAN AKSES PASAR	SARJANA		PELT.PETUGAS PENGWAS BARANG DAN JASA (PPBJ)		ISLAM
	19681201 200502 2 001	04/01/2017	TMT.08-10-2018					
	PONTIANAK, 1-12-1968							
35	MULYANI, SH	III/c	PENGAWAS USAHA OPERASI PRODUKSI DN PEMASARAN	SARJANA		PELT.PETUGAS PENGWAS BARANG DAN JASA (PPBJ)	P	ISLAM
	19690923 199403 2 009	04/01/2016	TMT.08-10-2018					
	PARASAK, 23-9-1969							
36	YURDHA HAFIDHA, A.Md	III/b	PENGOLAH FASILITASI MEDIASI PERLINDUNGAN KONSUMEN	DIPLOMA III		PELT.PETUGAS PENGWAS BARANG DAN JASA (PPBJ)	P	ISLAM
	19790914 200604 2 028	04/01/2018	TMT.08-10-2018					
	PONTIANAK, 14-9-1979							
<b>SEKSI SARANA PERDAGANGAN DAN PENGEMBANGAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>								
37	BUSRAN SAID, B.Sc	III/d	KEPALA SEKSI SARANA PERDAGANGAN DAN PENGEMBANGAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	SARJANA MUDA		DIKLATV TEKNIS MANAJEMEN OPERASIONAL PENGUJI MUTU BARANG	L	ISLAM
	19610513 198303 1 021	04/01/2006	(Eselon IV. A) TMT.07- 07-2017					
	SANGGAU, 13-5-1961							
38	HIDAYATI, ST,MT 19760726 200212 2 006 BANDA ACEH, 25 JULI 1976	III/d 10/01/2015		S2 / MAGISTER / MASTER		DIKLAT FUNGSIONAL PEELITI Tk. LANJUTAN Gel. IV	L	ISLAM

NO	NAMA LENGKAP	GOL.RUANG	JABATAN SEKARANG	PENDIDIKAN UMUM TERAKHIR	DIKLAT TERAKHIR		JNS KEL	AGAMA
	N I P	TMT	TMT		STRUKTURAL	FUNGSIONAL		
	TEMPAT DAN TGL.LAHIR							
39	SUMIATI	III/b	PENGELOLA DISTRIBUSI DAN PEMASARAN	SLTA UMUM			P	ISLAM
	19640110 198302 2 001	04/01/2003	TMT.08-10-2018					
	PONTIANAK, 10-1-1964							
40	EDY DARMAWAN	III/b	PENGADMINISTRASI PENGAMANAN DAN PERLINDUNGAN AKSES PASAR	SLTA KEJURUAN			L	ISLAM
	19720815 199303 1 009	10/01/2013	TMT.08-10-2018					
	PONTIANAK, 15-8-1972							
41	MIDHAYATI	III/b	PENGELOLA DISTRUBUSI DAN PEMASARAN	SLTA UMUM			P	ISLAM
	19660623 199403 2 003	04/01/2014	TMT.08-10-2018					
	PONTIANAK, 23-6-1966							
42	FILIPUS, S.STP	III/b	ANALIS PERDAGANGAN	DIPLOMA IV	DIKLATPIM TK. IV	DIKLAT PPNS-PK	L	ISLAM
	19910517 201206 1 001	10/01/2017	TMT.08-10-2018					
	PONTIANAK, 17-5-1991							
<b>SEKSI BARANG POKOK DAN BARANG PENTING DAN BINA USAHA PERDAGANGAN</b>								
43	FRANSISKA SARI WAHYUNI, SE		KEPALA SEKSI BARANG POKOK DAN BAANG PENTING DAN BINA USAHA PERDAGANGAN	SARJANA			L	ISLAM
	19840217 201001 2 012		(Eselon IV. A) TMT.16- 01-2017					
	PONTIANAK, 17-02-1984							
44	GENOVINA DABA	III/b	PENGELOLA PASAR	SLTA UMUM		DIKLAT PENG. ARSIP	P	ISLAM
	19620615 198602 2 007	04/01/2006	TMT.08-10-2018					

NO	NAMA LENGKAP	GOL.RUANG	JABATAN SEKARANG	PENDIDIKAN UMUM TERAKHIR	DIKLAT TERAKHIR		JNS KEL	AGAMA
	N I P	TMT	TMT		STRUKTURAL	FUNGSIONAL		
	TEMPAT DAN TGL.LAHIR							
	PUTUSSIBAU, 15-6-1962							
45	AHMAD RIDHA PRIARI,SE	III/a	PENGELOLA KEUANGAN	SARJANA			L	ISLAM
	19781129 201001 1 004	10/01/2016	TMT.08-10-2018					
	PONTIANAK,29-11-1978							
46	HAMZAH PANSURI	II/c	PENGELOLA PASAR	SLTA UMUM			L	ISLAM
	19641110 200701 1 031	04/01/2015	TMT.08-10-2018					
	PONTIANAK, 10-11-1984							
47	RITA KURNIASARI	II/c	PENGELOLA PEMASARAN	SLTA UMUM			P	ISLAM
	19720712 200701 2 009	04/01/2015	TMT.08-10-2018					
	PONTIANAK, 12-7-1972							
<b>BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI</b>								
48	SUGIRI, SE.,MH	IV/b	KEPALA BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	S2 / MAGISTER / MASTER	SPAMA	PENINGKATAN KINERJA PELAYANAN APARATUR	L	ISLAM
	19610408 198103 1 008	10/01/2012	(Eselon III. A) TMT.16- 01-2017					
	PONTIANAK, 8-4-1961							
<b>SEKSI EKSPOR</b>								
49	EKO DARMAWANSYAH SUGIHARTO, ST	III/d	KEPALA SEKSI EKSPOR DAN KERJASAMA PERDAGANGAN LUAR NEGERI	SARJANA			L	ISLAM
	19711101 199903 1 004	04/01/2011	(Eselon IV. A) TMT.16-					

NO	NAMA LENGKAP	GOL.RUANG	JABATAN SEKARANG	PENDIDIKAN UMUM TERAKHIR	DIKLAT TERAKHIR		JNS KEL	AGAMA
	N I P	TMT	TMT		STRUKTURAL	FUNGSIONAL		
	TEMPAT DAN TGL.LAHIR							
			01-2017					
	PONTIANAK, 1-11-1971							
50	MAULAD NUR CAHYANINGRUM	III/c	ANALIS PERDAGANGAN	SARJANA		Diklat Pemahaman Rules Of Origin	L	ISLAM
	19750313 200903 2 001	04/01/2017	TMT.08-10-2018					
	SURABAYA, 13-3-1975							
51	SUKIRAH	III/b	PENYGELOLA EKSPOR HASIL USAHA INDUSTRI DAN USAHA PERDAGANGAN	SLTA KEJURUAN		DIKLAT PENATAAN ARSIP	P	ISLAM
	19630915 198502 2 004	04/01/2004	TMT.08-10-2018					
	PONTIANAK, 15-9-1963							
52	SUMARNA	III/b	PENGELOLA FASILITASI DAN MEDIASI PEMBANGUNAN USAHA PERDAGANGAN EKSPOR IMPOR	SLTA KEJURUAN		DIKLAT BENDAHARA DAERAH	L	ISLAM
	19690805 198908 1 001	10/01/2008	TMT.08-10-2018					
	PONTIANAK, 5-8-1969							
53	MARDIANSYAH	II/c	PENGELOLA FASILITASI DAN MEDIASI PEMBANGUNAN USAHA PERDAGANGAN EKSPOR IMPOR	SLTA UMUM			L	ISLAM
	19700310 200701 1 027	10/01/2013	TMT.08-10-2018					
	PONTIANAK							
<b>SEKSI IMPOR DAN PERDAGANGAN LINTAS BATAS</b>								
54	BUDI LESTIONO SANJAYA, SP,MT,M.Sc	IV/a	KEPALA SEKSI IMPOR DAN PERDAGANGAN LINTAS BATAS	S2 / MAGISTER / MASTER	ADUM		L	ISLAM
	19720422 199603 1 002	04/01/2010	(Eselon IV. A) TMT.06-					



NO	NAMA LENGKAP	GOL.RUANG	JABATAN SEKARANG	PENDIDIKAN UMUM TERAKHIR	DIKLAT TERAKHIR		JNS KEL	AGAMA	
	N I P	TMT	TMT		STRUKTURAL	FUNGSIONAL			
	TEMPAT DAN TGL.LAHIR								
			02-2017						
	PONTIANAK, 22-4-1972								
55	A. ZULKIFLIE, Bc HK	III/c	PENYUSUN RENCANA PEMANTAUAN DAN EVALUASI PASAR	SARJANA MUDA		Metode Perencanaan Proyek OOPP/PCM	L	ISLAM	
	19611020 198502 1 002	04/01/2008	TMT.08-10-2018						
	PUTUSSIBAU, 20-10-1961								
56	MASWAR	III/b	PENGADMINISTRASI ANALISIS KEBUTUHAN EKSPOR	SLTA KEJURUAN			L	ISLAM	
	19670214 198503 1 002	10/01/2011	TMT.08-10-2018						
	PONTIANAK, 14-2-1967								
<b>SEKSI PENGEMBANGAN PASAR LUAR NEGERI</b>									
57	SUZANDELENI, S.IP	III/b	KEPALA SEKSI PROMOSI	SARJANA		Diklat Sistem Industri I Berbasis Kompetensi	P	KRISTEN	
	19860129 201101 2 004		01/10/2017						(Eselon IV. A) TMT.16- 01-2017
	PONTIANAK, 29-1-1986								
58	KAMALAH, SE	III/d	PENGELOLA EKSPOR HASIL USAHA INDUSTRI DAN USAHA PERDAGANGAN	SARJANA			P	ISLAM	
	19631022 199303 2 004	01/04/2005	TMT.08-10-2018						
	Sambas, 22 Oktober 1963								
59	AKHYAR	III/b	PENGELOLA EKSPOR HASIL USAHA INDUSTRI DAN USAHA PERDAGANGAN	SLTA UMUM			L	ISLAM	
	19650403 198703 1 012	04/01/2007	TMT.08-10-2018						

NO	NAMA LENGKAP	GOL.RUANG	JABATAN SEKARANG	PENDIDIKAN UMUM TERAKHIR	DIKLAT TERAKHIR		JNS KEL	AGAMA
	N I P	TMT	TMT		STRUKTURAL	FUNGSIONAL		
	TEMPAT DAN TGL.LAHIR							
	PEMANGKAT, 3-4-1965							
60	JATI SEPTIHANOYO, S.STP	III/b	PENGELOLA KEUANGAN	DIPLOMA IV		DIKLAT PPNS	L	ISLAM
	19920903 201406 1 003	10/01/2018	TMT.08-10-2018					
	Pontianak, 03 September 1992							
<b>BIDANG INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI, MARITIM, ELEKTRONIKA, TELEMATIKA DAN PENEGEMBANGAN SUMBER DAYA INDUSTRI</b>								
61	Drs. TONI SUNARDI,M.Si	IV/b	KEPALA BIDANG LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI, MARITIM,ELEKTRONIKA, TELEMATIKA DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA INDUSTRI	S2 / MAGISTER / MASTER	DIKLATPIM TK. III	TOT SOSIALISAI UUD45 Dan TAP MPR RI	P	ISLAM
	19700129 199003 1 004	01-04-2014	(Eselon III. A) TMT.09- 04-2018					
	MAOS LOR,							
<b>SEKSI INDUSTRI ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA</b>								
62	Drs. ENDI EZWAR	III/d	KEPALA SEKSI INDUSTRI LOGAM,ALAT TRANSPORTASI,MARITIM ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA	S1	ADUMLA	MANAJEMEN PENGADAAN BARANG/JASA	L	ISLAM
	19630826 1199003 1 008	10/01/2002	(Eselon IV. A) TMT.16- 01-2017					
	SAMBAS, 26-8-1963							
63	H. SYAMSUL KHOIR, SH	III/d	ANALIS BAHAN DAN BARANG TEKNIK LOGAM	SARJANA	ADUM	- PENERA	L	ISLAM
	19631229 198303 1 007	10/01/2009	TMT.08-10-2018			- PPNS PERDA		
	PONTIANAK, 29-12-1963							

NO	NAMA LENGKAP	GOL.RUANG	JABATAN SEKARANG	PENDIDIKAN UMUM TERAKHIR	DIKLAT TERAKHIR		JNS KEL	AGAMA
	N I P	TMT	TMT		STRUKTURAL	FUNGSIONAL		
	TEMPAT DAN TGL.LAHIR							
64	ZULKARNAEN	II/d	PENGADMINISTRASI INDENTIFIKASI DAN EVALUASI SENTRA PENGOLAHAN PRODUK	SLTA KEJURUAN		Diklat Penera	L	ISLAM
	19731117 200604 1 002	04/01/2018	TMT.08-10-2018					
	JUNGKAT, 17-11-1973							
65	LILIK SURYANTO, A.Md	III/a	PENGELOLA KEUANGAN	DIPLOMA III			I	ISLAM
	19711003 200604 1 007	04/01/2014	TMT.08-10-2018					
	PONTIANAK, 3-10-1971							
<b>SEKSI INDUSTRI PERMESINAN DAN ALAT MESIN PERTANIAN</b>								
66	Drs. SIRON TAMBA	III/d	KEPALA SEKSI PERMESINAN DAN ALAT MESIN PERTANIAN	SARJANA	ADUM		L	KATHOLIK
	19640222 199203 1 005	04/01/2002	(Eselon IV. A) TMT.16- 01-2017					
	HARANGGASAN, 22-2-1964							
67	M.SALAHUDDIN, SH	III/c	ANALIS TEKNOLOGI INDUSTRI	SARJANA			L	ISLAM
	19680403 199103 1 007	10/01/2017	TMT.08-10-2018					
	PONTIANAK, 3-4-1968							
68	DESSY FIAN TY ROZANA	III/b	PENGADMINISTRASI INDENTIFIKASI DAN EVALUASI SENTRA PENGOLAHAN PRODUK	SLTA UMUM			P	ISLAM
	19651208 199403 2 006	04/01/2014	TMT.08-10-2018					
	PONTIANAK, 8-12-1965							

NO	NAMA LENGKAP	GOL.RUANG	JABATAN SEKARANG	PENDIDIKAN UMUM TERAKHIR	DIKLAT TERAKHIR		JNS KEL	AGAMA
	N I P	TMT	TMT		STRUKTURAL	FUNGSIONAL		
	TEMPAT DAN TGL.LAHIR							
69	ENI SUMARTINGINSIH	IIIi/b	PENGADMINISTRASI INDENTIFIKASI DAN EVALUASI SENTRA PENGOLAHAN PRODUK	SLTA UMUM			P	ISLAM
	19640520 198502 2 003	04/01/2005	TMT.08-10-2018					
	PONTIANAK, 20-05-1964							
<b>SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA INDUSTRI</b>								
70	DIMYATI,S.Sos	III/d	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA INDUSTRI	SARJANA			L	KATHOLIK
	19660606 198902 1 003	10/01/2010						
	TEGAL 06-06-1966		(Eselon IV. A) TMT.16-01-2017					
71	AMIN HERI SYAFRIADI	III/a	ANALIS INDUSTRI	SLTA KEJURUAN		- DIKLAT PPBJD	L	ISLAM
	19720329 200701 1 009	04/01/2017	TMT.08-10-2018					
	PONTIANAK, 29-3-1972							
72	PURWANTO	II/c	PENGADMINISTRASI INDENTIFIKASI DAN EVALUASI SENTRA PENGOLAHAN PRODUK	SLTA KEJURUAN			L	ISLAM
	19720605 200701 1 037	04/01/2015	TMT.08-10-2018					
	PONTIANAK, 5-6-1972							
<b>BIDANG SISTEM INFORMASI INDUSTRI PROMOSI INDUSTRI, INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH</b>								
73	SUHARDI, SPd,M.Pd	IV/b	KEPALA BIDANG SISTEM INFORMASI, PROMOSI INDUSTRI,INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	S2 / MAGISTER / MASTER	DIKLATPIM Tk.II		L	ISLAM
	19640808 198601 1 004	10/01/2016	(Eselon IV. A) TMT.09-04-2018					
	PONTIANAK, 08-08-1964							

NO	NAMA LENGKAP	GOL.RUANG	JABATAN SEKARANG	PENDIDIKAN UMUM TERAKHIR	DIKLAT TERAKHIR		JNS KEL	AGAMA	
	N I P	TMT	TMT		STRUKTURAL	FUNGSIONAL			
	TEMPAT DAN TGL.LAHIR								
<b>SEKSI SISTEM INFORMASI DAN PROMOSI INDUSTRI</b>									
74	IRYAN'SAH, SE	III/c	KEPALA SEKSI SISTEM INFORMASI INDUSTRI DAN PROMOSI INDUSTRI	SARJANA		MANAJEMEN PENGADAAN	L	ISLAM	
	19720922 199203 1 003	10/01/2015	(Eselon IV. A) TMT.16- 01-2017			BARANG/JASA			
	JUNGKAT,22-09-1972								
75	MUCHDIYATI	III/a	PENGELOLA HUBUNGAN KERJASAMA USAHA INDUSTRI	SLTA UMUM			P	ISLAM	
	19601230 198303 2 015	04/01/2015	TMT.08-10-2018						
	BANJUR MUTADAN, 30-12-1960								
76	ANDI BAHTERA YUDA, ST	III/a	ANALIS INDUSTRI	SARJANA		DIKLAT AMDAL	L	ISLAM	
	19840829 201502 1 001	04/01/2015	TMT.08-10-2018						
	PONTIANAK..29-08-1984								
<b>SEKSI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH PANGAN, BARANG DARI KAYU,FURNITURE,KIMIA,SANDANG DAN KERAJINAN</b>									
77	RATNA NATALIA, SE,ME	III/d	KEPALA SEKSI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH PANGAN, BARANG DARI KAYU, FURNITURE,KIMIA, SANDANG DAN KERAJINAN	SARJANA	DIKLAT PIM IV		P	KRISTEN	
	19791105 200604 2 009	10/01/2017							
	SUKAMAJU,05-11-12979		(Eselon IV. A) TMT.16- 01-2017						
78	ERICHO.W,ST	III/b	PENYULUH PERINDAG	SARJANA		Pelatihan Pengawasan SNI Industri	L	KRISTEN	
	19831022 200903 1 001	04/01/2013	TMT,01-04-2014						

NO	NAMA LENGKAP	GOL.RUANG	JABATAN SEKARANG	PENDIDIKAN UMUM TERAKHIR	DIKLAT TERAKHIR		JNS KEL	AGAMA
	N I P	TMT	TMT		STRUKTURAL	FUNGSIONAL		
	TEMPAT DAN TGL.LAHIR							
	Serukam, 22 Oktober 1983							
79	TONI	III/b	PENGELOLA PRODUKSI	SLTA		Bimtek Arsip Vital	I	ISLAM
	19740809 199603 1 002	01-10-2017	TMT.08-10-2018					
	Pemangkat, 09 Agustus 1974							
<b>SEKSI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH LOGAM, BAHAN GALIAN NON</b>								
80	MUHAMMAD MUNIR, SE.MM	IV/a	KEPALA SEKSI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH LOGAM, BAHAN,GALIAN NON LOGAM,MESIN,ALAT ANGKUT ,ELEKTRONIKA DAN ANEKA	S1	DIKLAT PIM IV		L	ISLAM
	19620207 199101 1 004	01-04-2015	(Eselon IV. A) TMT.16-01-2017					
	SINTANG, '07 FEBRUARI 1962							
81	AJARNI, SH	III/d	ANALIIS KERJASAMA INDUSTRI	S1		Diklat Manajemen Ekspor Import Plus Simulasi		
	19630930 198503 2 012		TMT.08-10-2018					
	Sanggau, 30 September 1963							
82	YUDI SUHERI, SE	III/d	PENGELOLA KEUANGAN	SARJANA			L	ISLAM
	19690529 199803 1 004	10/01/2014	TMT.08-10-2018					
	PONTIANAK, 29-5-1969							
83	WALTER SITORUS, ST	III/b	PENYULUH PERINDUSTRIAN	SARJANA			L	KRISTEN
	19750118 200903 1 001	04/01/2013	TMT,01-04-2014					
	DESA TANGGA, 18-1-1975							
84	SUPIANTO	II/d	PENGELOLA HUBUNGAN KERJASAMA USAHA INDUSTRI	SLTA UMUM			L	ISLAM

NO	NAMA LENGKAP	GOL.RUANG	JABATAN SEKARANG	PENDIDIKAN UMUM TERAKHIR	DIKLAT TERAKHIR		JNS KEL	AGAMA
	N I P	TMT	TMT		STRUKTURAL	FUNGSIONAL		
	TEMPAT DAN TGL.LAHIR							
	19620417 199103 1 006	10/01/2013	TMT.08-10-2018					
	SAMBAS, 17-4-1962							
<b>UPT. INDUSTRI PENGOLAHAN DAN KEMASAN</b>								
<b>SEKSI PENYELENGGARAAN PELATIHAN</b>								
85	MENIK WALTAS NGATUN,S.Sos	III/d	KEPALA SEKSIPEMGEMBANGAN KEMASAN DAN USAHA	SARJANA	DIKLAT PIM IV		P	ISLAM
	19660925 199003 2 008	01-04-2012	(Eselon IV.A ) TMT.01 - 04 - 2018					
	PONTIANAK, 25 - 09 - 1966							
86	SRI ETI WAHYUNINGSIH, S.H	III/d	PENELAAH PENGEMBANGAN USAHA	SARJANA			P	ISLAM
	19671015 198902 2 003	04/01/2016	TMT.08-10-2018					
	PONTIANAK, 15-10-1967							
87	MARDANUS, S.Sos	III/c	PERANCANG KEMASAN INFORMASI STANDARISASI	SARJANA			L	ISLAM
	19650717 198712 1 004	01/04/2015	TMT.08-10-2018					
	PONTIANAK, 17-7-1965							
<b>SUB BAGIAN TATA USAHA</b>								
88	TRI NOPI HANDAYANI, ST	III/d	KA SUB BAGIAN TATA USAHA PADA UPIKM	SARJANA			P	ISLAM
	19811103 200604 2 006	04/01/2018	(Eselon IV.A ) TMT.01 - 04 - 2018					
	PONTIANAK, 3-11-1981							

NO	NAMA LENGKAP	GOL.RUANG	JABATAN SEKARANG	PENDIDIKAN UMUM TERAKHIR	DIKLAT TERAKHIR		JNS KEL	AGAMA
	N I P	TMT	TMT		STRUKTURAL	FUNGSIONAL		
	TEMPAT DAN TGL.LAHIR							
89	SUWITONO,SH	III/d	ANALIS JABATAN	SARJANA			L	ISLAM
	19650408 198603 1 021	04/01/2018	TMT.08-10-2018					
	PONTIANAK, 8-4-1965							
90	SITI NUHADIAH	III/b	PENGADMINISTRASI UMUM	SLTA UMUM			P	ISLAM
	19620502 198503 2 006	10/01/2003	TMT.08-10-2018					
	MEMPAWAH, 2-5-1962							
91	LAINI	III/b	BENDAHARA	SLTA KEJURUAN			P	ISLAM
	19660122 198903 2 008	04/01/2008	TMT.08-10-2018					
	CIREBON, 22-1-1966							
92	JULIANA	III/b	PENGELOLA KEUANGAN	SLTA KEJURUAN		Diklat Bendaharawan Daerah	P	ISLAM
	19690702 199201 2 003	04/01/2011	TMT.08-10-2018					
	PONTIANAK, 2-7-1969							
93	DERI OCTARIS COWARI	II/c	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	SLTA KEJURUAN				
	19761002 200801 1 010	04/01/2017	TMT.08-10-2018					
	PONTIANAK, 02-10-1976							
94	RONO	II/b	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	SLTA KEJURUAN			L	KATHOLIK
	19820830 201212 1 001	04/01/2016	TMT.08-10-2018					
	LANDAK, 30-8-1982							
<b>SEKSI BIMBINGAN PASCA PELATIHAN</b>								
95	AMPERA,S.Sos	III/d	KEPALA SEKSI INDUSTRI PANGAN DAN OLAHAN	SARJANA	DIKLAT PIM TK.IV	Diklat Legal Drafting	L	ISLAM
	19660414 198603 1 004	04/01/2014	(Eselon IV.A ) TMT.01 - 04 - 2018					
	PADANG, 14-04-1966							



NO	NAMA LENGKAP	GOL.RUANG	JABATAN SEKARANG	PENDIDIKAN UMUM TERAKHIR	DIKLAT TERAKHIR		JNS KEL	AGAMA
	N I P	TMT	TMT		STRUKTURAL	FUNGSIONAL		
	TEMPAT DAN TGL.LAHIR							
96	HERMANSYAH, B.Sc	III/c	ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI INDUSTRI	SARJANA MUDA		Diklat Penyuluh Indag	L	ISLAM
	19620207 199101 1 003	04/01/2009	TMT.08-10-2018					
	SAMBAS, 7-2-1962							
97	BAMBANG HARYONO	III/b	PENYUSUN BAHAN KERJASAMA PELATIHAN	SLTA UMUM		Diklat Penyuluh Indag Tk. Dasar	L	ISLAM
	19660630 199203 1 005	10/01/2013	TMT.08-10-2018					
	MADIUN, 30-6-1966							
98	NURUL YAKIN	III/b	PENGELOLA PENYELENGGARAAN DIKLAT	SLTA UMUM			L	ISLAM
	19640412 199203 1 017	04/01/2012	TMT.08-10-2018					
	MENENDANG, 12-4-1964							
<b>UPT. PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG</b>								
99	Drs. MURSALINSYAH, M.Si	IV/b	KEPALA UPT	S2 / MAGISTER / MASTER	DIKLATPIM TK. III	TOT KEWIDYAIWARAAN	L	ISLAM
	19660807 198603 1 011	10/01/2013	(Eselon III. A) TMT.01 - 04 - 2018					
	SINTANG, 7-8-1966							
<b>SUB BAGIAN TATA USAHA</b>								
100	TUTI SETIAWATI	III/b	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	SLTA KEJURUAN			P	ISLAM
	19630906 198303 2 017	04/01/2002	TMT.08-10-2018					
	PONTIANAK, 6-9-1963							
101	SULASTRI	III/b	PENGAMINISTRASI UMUM	SLTA KEJURUAN	PRAJABATAN		P	ISLAM
	19650202 198602 2 009	04/01/2011	TMT.08-10-2018					

NO	NAMA LENGKAP	GOL.RUANG	JABATAN SEKARANG	PENDIDIKAN UMUM TERAKHIR	DIKLAT TERAKHIR		JNS KEL	AGAMA
	N I P	TMT	TMT		STRUKTURAL	FUNGSIONAL		
	TEMPAT DAN TGL.LAHIR							
	PONTIANAK, 2-2-1965							
102	DONI FARDIANSYAH	II/c	BENDAHARA PENGLUARAN PEMBANTU	SLTA UMUM			L	ISLAM
	19690120 200701 1 017	04/01/2014	TMT.08-10-2018					
	PONTIANAK, 20-1-1969							
103	DEPI HERMAYANTI	II/b	PENGADMINISTRASI UMUM	SLTA UMUM		Bimtek Simpeg Online	P	ISLAM
	19800315 201101 2 007	04/01/2014	TMT.08-10-2018					
	PONTIANAK, 15-03-1980							
104	HAMZAH	II/a	BENDAHARA PENERIMA PEMBANTU	SLTA		Bimtek Simpeg Online	L	ISLAM
	19760617 201001 1 007	04/01/2014	TMT.08-10-2018					
	PONTIANAK, 17-6-1976							
<b>SEKSI PENGUJIAN</b>								
105	MUHAMMAD RIDWAN.HM, S.Sos	III/d	KEPALA SEKSI	SARJANA	DIKLATPIM TK. IV	Diklat Teknis Manajemen Operasional PMB	L	ISLAM
	19611124 198303 1 013	04/01/2007	(Eselon IV.A ) TMT.01 - 04 - 2018					
	PONTIANAK, 24-11-1961							
106	MAHDI	III/d	PENGUJI MUTU BARANG PENYELIA	SLTA UMUM		PELATIHAN TEKNIS PENGUJIAN AIR DAN AIR LIMBAH	L	ISLAM
	19640515 198303 1 001	10/01/2011	TMT.01-10-1998					
	PONTIANAK, 15-5-1964							
107	YUNIAR YOGA GUNAWAN, ST	III/d	PENGUJI MUTU BARANG MUDA	SARJANA		PELATIHAN TEKNIS PENGUJIAN AIR DAN AIR LIMBAH	L	ISLAM
	19800627 200604 1 006	10/01/2018	TMT.01-10-2013					
	NANGA BUNUT, 27-6-1980							
108	YUDIANSYAH, SP	III/d	PENGUJI MUTU BARANG MUDA	SARJANA		Diklat Teknis Kalibrasi dan Alat Ukur Kelistrikan	L	ISLAM

NO	NAMA LENGKAP	GOL.RUANG	JABATAN SEKARANG	PENDIDIKAN UMUM TERAKHIR	DIKLAT TERAKHIR		JNS KEL	AGAMA
	N I P	TMT	TMT		STRUKTURAL	FUNGSIONAL		
	TEMPAT DAN TGL.LAHIR							
	19710719 200604 1 009 PONTIANAK, 19-7-1971	10/01/2018	TMT.01-10-2014					
109	AVISENA DIAN PASILA, SP 19720601 200604 1 009 SINTANG, 1-6-1972	III/d 04/01/2018	PENGUJI MUTU BARANG MUDA TMT.01-10-2014	SARJANA		Diklat Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional PMB	L	ISLAM
110	CANCER MESTER SIMANGUNSONG, S.Si 19820717 201101 1 003 PONTIANAK, 17-7-1982	III/b 04/01/2014	PENGUJI MUTU BARANG PERTAMA TMT.01-12-2015	SARJANA		Pelatihan Teknis Internal Pengujian SIR	L	KRISTEN
111	EVY DWI KURNIASI, S.Si 19851028 201101 2 004 PONTIANAK, 28-10-1985	III/b 04/01/2014	PENGUJI MUTU BARANG PERTAMA TMT.01-12-2015	SARJANA		Pelatihan Teknis Internal Pengujian Mutu SIR	P	ISLAM
112	SUMEDI 19680303 200901 1 005 PONTIANAK, 3-3-1968	II/a 04/01/2014	PENGELOLA SAMPLE PENGUJIAN TMT.08-10-2018	SLTA		Diklat Pengambilan Contoh Komoditi Sir	L	ISLAM
<b>SEKSI SERTIFIKASI MUTU BARANG</b>								
113	Dra. SRI ARTIANI 19640219 199003 2 009 PONTIANAK, 29 -02 -1964	III/d 01/01/2001	KEPALA SEKSI (Eselon IV.A ) TMT.01 - 04 - 2018	SARJANA	DIKLAT PIM IV			
114	EKA BETTY KURNIA, SP 19820606 200604 2 018 SEI. AMBAWANG, 6-6-1982	III/d 04/01/2018	PENYUSUN PROMOSI DAN KERJASAMA TMT.08-10-2018	SARJANA			P	ISLAM

NO	NAMA LENGKAP	GOL.RUANG	JABATAN SEKARANG	PENDIDIKAN UMUM TERAKHIR	DIKLAT TERAKHIR		JNS KEL	AGAMA
	N I P	TMT	TMT		STRUKTURAL	FUNGSIONAL		
	TEMPAT DAN TGL.LAHIR							
115	YANTO, SP	III/d	PENGELOLA SERTIFIKASI	SARJANA			L	ISLAM
	19740823 200604 1 006	04/01/2018	TMT.08-10-2018					
	PASAK PIANG, 23-8-1974							
116	SUMA WARUKIZA, ST	III/d	PENGUJI MUTU BARANG MUDA	SARJANA		Pelth.Kalibrasi Conductivity,Spectrifotometer uV-VIS dan	L	ISLAM
	19830421 200604 1 011	10/01/2017	TMT.01-10-2013					
	JUNGKAT, 21-4-1983							

Sumber : Dinas Perindag Prov. Kalbar per 31 Desember 2018

## **E. Kondisi Sarana dan Prasarana**

Dari sisi sarana dan prasarana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat menempati kantor di jalan Sutan Syahrir no. 2 Pontianak, kondisi kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk saat ini sudah mengalami perluasan sehingga kondisi kerja sudah terasa relatif nyaman karena sudah dapat menampung para pegawai yang ada secara layak sehingga pelayanan umum yang diberikan pun sudah tidak terganggu lagi.

Namun masih terdapat beberapa ruangan yang harus di perbaiki terutama lantai dua gedung lama eks-Kanwil Dinas Perindag Prov. Kalbar yang perlu direhab. Demikian juga lingkungan kantor perlu di lakukan perbaikan mengingat kerap terjadi banjir pada saat hujan intensitas tinggi. Untuk saat ini Dinas Perindag Prov. Kalbar sudah memiliki ruangan pameran dan yang berguna untuk menjadi tempat pameran tetap dan display produk industri dan perdagangan di Kalbar serta menjadi tempat diskusi / tukar menukar informasi antar pelaku usaha dan dengan aparat.

## **BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)**

### **A. Visi dan Misi SKPD**

#### **Visi :**

***“Terwujudnya Industri Yang Maju Dan Perdagangan Yang Tangguh Guna Mendukung Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Kalimantan Barat”***

- Industri yang maju mengandung makna bahwa pembangunan industri di Kalbar maju pada pengolahan hasil sumber-sumber daya utama daerah, seimbang dalam struktur (industri besar-menengah-kecil dan antara hulu-hilir), dan dipersiapkan untuk tidak tersebar tetapi pemusatan lokasi industri untuk kemudahan penyediaan infrastruktur & pengendalian lingkungan. Industri maju juga berarti maju dalam penyerapan tenaga kerja dan berbasis inovasi yang terus menerus.
- Perdagangan yang tangguh mengandung makna bahwa perdagangan di Kalbar diarahkan pada sistem dan distribusi perdagangan yang sehat dan efisien baik kedalam maupun keluar Kalbar bagi para pelaku perdagangan dan memberikan perlindungan bagi seluruh konsumen di Kalbar (dari gejolak kelangkaan stok utamanya bahan pokok & strategis serta keamanan konsumen) sehingga mampu menciptakan perdagangan daerah yang memiliki daya saing dan berketahanan yang tinggi yang pada akhirnya mampu berperan didalam perdagangan regional maupun internasional.
- Guna mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Kalimantan Barat mengandung makna bahwa pertumbuhan ekonomi dari sektor perindustrian dan perdagangan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Kalimantan Barat berupa sumbangan PDRB sektor industri dan perdagangan yang tinggi dan tidak hanya dinikmati oleh Usaha Menengah – Besar tetapi juga oleh usaha kecil dan menengah sehingga dapat memberikan kontribusi pada kesejahteraan masyarakat Kalbar.

#### **Misi :**

1. Menumbuh kembangkan sektor industri untuk dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan sektor perindustrian daerah Kalimantan Barat
2. Mengembangkan perdagangan dalam dan luar negeri sehingga dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan sektor perdagangan daerah Kalimantan Barat.

**B. Tujuan & Sasaran Strategis Jangka Menengah Dinas Perindag Prov. Kalbar 2013-2018**

TUJUAN STRATEGIS		SASARAN STRATEGIS	
1	Revitalisasi dan penguatan struktur industri Kalbar	1	Tumbuh dan berkembangnya sektor industri Kalimantan Barat
2	Meningkatkan stabilitasi dan penguatan pasar lokal yang terintegrasi dengan pasar dalam negeri	2	meningkatnya efisiensi perdagangan dalam negeri yang didukung dengan pengamanan perdagangan daerah
3	Meningkatkan perdagangan luar negeri daerah yang berkualitas	3	meningkatnya ekspor daerah dan terkendalinya impor

**C. Strategi dan Arah Kebijakan OPD**

Untuk mencapai sasaran strategis (jangka menengah) diatas, maka ditempuh strategi dan kebijakan sebagai berikut :

**Tumbuh dan berkembang sektor industri (SS 1)**

STRATEGI		KEBIJAKAN
Revitalisasi Industri melalui peluang hilirisasi komoditi primer utama, Penguatan struktur industri, serta penumbuhkembangan IKM berbasis bahan baku lokal		Mendorong penumbuhkembangan industri yang memberikan nilai tambah komoditi utama potensi daerah melalui pendekatan kewilayahan, kawasan dan memperkuat industri secara berkelanjutan dan berdaya saing
		Mendorong penumbuhkembangan IKM melalui pendampingan, pelatihan dan promosi IKM serta penyediaan informasi pengolahan komoditi dan pasar terutama industri pengolahan yang berbasis bahan baku lokal

**Meningkatnya efisiensi distribusi perdagangan dalam negeri yang didukung dengan pengamanan perdagangan daerah (SS2)**

STRATEGI	KEBIJAKAN
----------	-----------

Meningkatkan kelancaran distribusi barang pokok dan barang strategis, penggunaan produk dalam negeri, perlindungan konsumen, pengamanan perdagangan daerah, serta mengembangkan perdagangan dan sistim perdagangan yang tertib, efisien, transparan dan berdaya saing	Memperkuat sistem distribusi yang efisien dan efektif yang menjamin kepastian berusaha, mendorong berkembangnya lembaga perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat, mendorong integrasi aktivitas perekonomian dan terbangunnya kesadaran penggunaan produksi dalam negeri, meningkatnya perdagangan antar wilayah/daerah, serta terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya dengan harga yang terjangkau
---	---

### **Meningkatnya Ekspor daerah dan terkendalinya impor (SS3)**

<b>STRATEGI</b>	<b>KEBIJAKAN</b>
Mempertahankan pasar yang ada dan mengembangkan pasar baru dengan pelaku dan komoditi ekspor berbasis potensi daerah yang berdaya saing serta upaya-upaya mengendalikan impor	Mendorong upaya-upaya perluasan jenis komoditi dan tujuan pasar ekspor yang berkualitas dan berdaya saing ditunjang pemantauan dan pengawasan atas impor daerah

#### **D. Program Nasional yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar**

Program nasional yang dilaksanakan oleh Dinas Perindag Prov. Kalbar pada tahun 2018 sebanyak 3 Program yaitu :

- Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dengan pagu anggaran Rp. 1.322.000.000,-.
- Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.319.188.000,-.
- Program Peningkatan Perdagangan luar Negeri dengan pagu anggaran sebesar Rp. 591.989.000,-.

#### **E. Standar Pelayanan Umum**

##### **E.1 Peraturan Penetapan SOP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat.**

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Perindag Prov. Kalbar dilaksanakan oleh Tim Penyusunan Standar



Operasional Prosedur (SOP) Dinas Perindag Prov. Kalbar sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 111 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Penyusunan SOP Dinas Dinas Perindag Prov. Kalbar.

## **E.2 Jumlah SOP (Teknis) OPD**

Sebagai instansi yang memiliki pelayanan, Dinas Perindag Prov. Kalbar memiliki 2 (dua) SOP seperti yang terdapat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 3. SOP Teknis Dinas Perindag Prov. Kalbar

NO	URAIAN/ JUDUL SOP
1	Penerbitan Surat keterangan Asal (SKA atau <i>Certificate of Origin</i> )
2	Pelayanan Pengujian Mutu barang dan Kalibrasi

## F. Kesesuaian Program dan Kegiatan SKPD Tahun Anggaran 2018

### F.1 Ringkasan Program dan Kegiatan Pada Renstra SKPD

Tabel 4. Kesesuaian Program dan Kegiatan Dinas Perindag Prov. Kalbar T.A. 2018

NO	PROGRAM	KEGIATAN	RENSTRA	RENJA	RKPD	RKA	DPA	DPAP
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I</b>	<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROV. KALBAR</b>							
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	√	√	√	√	√
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	√	√	√	√	√
		3	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	√	√	√	√	√
		4	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	√	√	√	√	√
		5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	√	√	√	√	√

NO	PROGRAM	KEGIATAN	RENSTRA	RENJA	RKPD	RKA	DPA	DPAP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	√	√	√	√	√	√
		7	Penyediaan Alat Tulis kantor	√	√	√	√	√	√
		8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	√	√	√	√	√	√
		9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	√	√	√	√	√	√
		10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	√	√	√	√	√	√
		11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	√	√	√	√	√	√
		12	Penyediaan Makanan dan Minuman	√	√	√	√	√	√
		13	Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	√	√	√	√	√	√
		14	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/ Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	√	√	√	√	√	√
		15	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	√	√	√	√	√	√
		16	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	√	√	√	√	√	√
		17	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	√	√	√	√	√	√
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	1	Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Kantor	√	√	√	√	√	√
		2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	√	√	√	√	√	x
		3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	√	√	√	√	√	√

NO	PROGRAM	KEGIATAN		RENSTRA	RENJA	RKPD	RKA	DPA	DPAP
1	2	3		4	5	6	7	8	9
		4	Pemeliharaan Rutin./Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	√	√	√	√	√	√
		5	Pemeliharaan Rutin/Berkala AC/Kipas Angin	√	√	√	√	√	√
		6	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan/Peralatan kantor	√	√	√	√	√	√
		7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	√	√	√	√	√	√
		8	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	√	√	√	√	√	√
		9	Pembangunan Plank Nama Kantor	√	√	√	√	√	√
		10	Pemeliharaan Instalasi Listrik/Telepon	√	√	√	√	√	√
		11	Peningkatan Jalan/Jembatan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan	√	√	√	√	√	√
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	1	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	√	√	√	√	√	X
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	1	Pendidikan dan Pelatihan	√	√	√	√	√	√
		2	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	√	√	√	√	√	√
		3	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	√	√	√	√	√	√
		4	Pembinaan Jasmani dan Rohani	√	√	√	√	√	√
		5	Penyusunan Analisa Jabatan	√	√	√	√	√	√
		6	Penyusunan Penetapan Kinerja	√	√	√	√	√	√
5	PROGRAM	1	Penyusunan Laporan Keuangan	√	√	√	√	√	√

NO	PROGRAM	KEGIATAN		RENSTRA	RENJA	RKPD	RKA	DPA	DPAP
1	2	3		4	5	6	7	8	9
	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	2	Penyusunan LAKIP	√	√	√	√	√	√
		3	Penyusunan RENSTRA	√	√	√	√	√	X
		4	Penyusunan RENJA SKPD	√	√	√	√	√	√
		5	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	√	√	√	√	√	√
		6	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	√	√	√	√	√	X
		7	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	√	√	√	√	√	√
		8	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	√	√	√	√	√	√
6	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	1	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	√	√	√	√	√	√
7	PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	1	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Pasar di Kabupaten/Kota	√	√	√	√	√	√
		2	Pameran Produk Dalam Negeri	√	√	√	√	√	√
		3	Penyelenggaraan Pasar Murah Menghadapi Hari Besar Keagamaan	√	√	√	√	√	√
		4	Monitoring Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	√	√	√	√	√	√
		5	Pengawasan Barang Beredar	√	√	√	√	√	√
		6	Penyusunan Produk Hukum Bidang Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen	√	√	√	√	√	√

NO	PROGRAM	KEGIATAN	RENSTRA	RENJA	RKPD	RKA	DPA	DPAP
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7	Seleksi dan Pengangkatan Anggota dan Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	√	√	√	√	√
		8	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi BPSK	√	√	√	√	√
		9	Monitoring dan Pembinaan Perdagangan Barang Dalam Pengawasan	√	√	√	√	√
		10	Pengumpulan dan Pengolahan Data SIUP, TDP dan TDG	√	√	√	√	X
		11	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penerapan Sistem Resi Gudang	√	√	√	√	√
		12	Rapat Koordinasi Kesiapan Barang Kebutuhan Pokok Menjelang HBKN	√	√	√	√	√
8	PROGRAM PENINGKATAN EKSPOR DAN PENGENDALIAN IMPOR	1	Pembinaan Perdagangan Lintas Batas	√	√	√	√	√
		2	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Importir	√	√	√	√	X
		3	Forum Kerjasama Regional (Sosek-Malindo dan BIMP-EAGA)	√	√	√	√	√
		4	Partisipasi Pada Pameran Produk Ekspor dan Promosi Dagang di Luar Negeri	√	√	√	√	√
		5	Partisipasi Pada Pameran Produk Ekspor Daerah (PPED)	√	√	√	√	√
		6	Forum Kerjasama Peningkatan Ekspor Daerah	√	√	√	√	√
		7	Peningkatan Informasi Ekspor dan Impor	√	√	√	√	√

NO	PROGRAM	KEGIATAN	RENSTRA	RENJA	RKPD	RKA	DPA	DPAP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9	PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI	1	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Pangan	√	√	√	√	√	√
		2	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Tekstil dan Aneka	√	√	√	√	√	√
		3	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Hasil Hutan (kayu)	√	√	√	√	√	√
		4	Penumbuhan dan Pembangunan Perwilayahan Industri Kalbar	√	√	√	√	√	√
		5	Penumbuhan dan Pembangunan SIKIM di Kalbar	√	√	√	√	√	X
		6	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Hasil Tanaman Pangan di Kalimantan Barat	√	√	√	√	√	X
		7	Pengembangan Industri Hilir Karet Berbasis Latek Pekat di Kalimantan Barat	√	√	√	√	√	X
		8	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Hilir Sawit Non Pangan	√	√	√	√	√	X
		9	Pengembangan Industri Elektronika dan Telematika	√	√	√	√	√	√
		10	Pengembangan Industri Alat Angkut (Alat Transportasi dan Maritim)	√	√	√	√	√	√
		11	Pembinaan dan Pengembangan Industri Hilirisasi Tambang Bauksit	√	√	√	√	√	√
		12	Pengembangan Sumber Daya Industri	√	√	√	√	√	√
		13	Pengembangan industri Alsintan Center	√	√	√	√	√	√

NO	PROGRAM	KEGIATAN		RENSTRA	RENJA	RKPD	RKA	DPA	DPAP
1	2	3		4	5	6	7	8	9
		14	Partisipasi Promosi dan Pameran Produk Unggulan IKM di Dalam dan Luar Negeri.	√	√	√	√	√	√
		15	Pembinaan & Pengembangan Industri Berbasis One Village One Product	√	√	√	√	√	√
		16	Pemutakhiran Data IKM	√	√	√	√	√	X
		17	Monitoring / Pembinaan IKM	√	√	√	√	√	√
		18	Study Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri	√	√	√	√	√	X
		19	Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) Pangan	√	√	√	√	√	√
		20	Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) Konveksi dan Percetakan	√	√	√	√	√	√
		21	Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) Furniture	√	√	√	√	√	√
		22	Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) Logam	√	√	√	√	√	√
		23	Pembangunan Aplikasi Sistem Informasi Sentra Layanan IKM dan Market Place	√	√	√	√	√	√
10	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN PENGEMBANGAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN DAERAH	1	Rapat Kerja Industri dan Perdagangan se-Kalbar serta Singkronisasi Program/Kegiatan Pusat dan Daerah	√	√	√	√	√	√
		2	Penyusunan Data Spasial Bidang Indag Kalbar	√	√	√	√	√	X



NO	PROGRAM	KEGIATAN	RENSTRA	RENJA	RKPD	RKA	DPA	DPAP
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>II UNIT PELATIHAN INDUSTRI KECIL MENENGAH</b>								
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	√	√	√	√	√
		2	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	√	√	√	√	√
		3	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	√	√	√	√	√
		4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	√	√	√	√	√
		5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	√	√	√	√	√
		6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	√	√	√	√	√
		7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	√	√	√	√	√
		8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	√	√	√	√	√
		9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUndang-Undangan	√	√	√	√	√
		10	Penyediaan Makanan dan Minuman	√	√	√	√	√
		11	Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	√	√	√	√	√
		12	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	√	√	√	√	√
		13	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	√	√	√	√	√

NO	PROGRAM	KEGIATAN		RENSTRA	RENJA	RKPD	RKA	DPA	DPAP
1	2	3		4	5	6	7	8	9
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	1	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	√	√	√	√	√	X
		2	Pengadaan sarana/prasarana pendukung gedung kantor	√	√	√	√	√	X
		3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	√	√	√	√	√	√
		4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	√	√	√	√	√	√
		5	Pemeliharaan Rutin/Berkala AC/Kipas Angin	√	√	√	√	√	√
		6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Kantor	√	√	√	√	√	√
		4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	√	√	√	√	√	√
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	1	Pendidikan dan Pelatihan	√	√	√	√	√	√
		2	Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Workshop	√	√	√	√	√	√
		3	Penyusun Analisis Jabatan	√	√	√	√	√	√
		4	Penetapan Kinerja	√	√	√	√	√	√
		5	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	√	√	√	√	√	√
		6	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	√	√	√	√	√	X
4	PROGRAM PENINGKATAN	1	Penyusunan Laporan Keuangan	√	√	√	√	√	√
		2	Penyusunan LAKIP	√	√	√	√	√	√

NO	PROGRAM	KEGIATAN		RENSTRA	RENJA	RKPD	RKA	DPA	DPAP
1	2	3		4	5	6	7	8	9
	PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	3	Penyusunan RENJA SKPD	√	√	√	√	√	√
		4	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	√	√	√	√	√	√
5	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH		Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	√	√	√	√	√	√
6	PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI	1	Pelatihan Teknis Pengembangan Desain Kemasan Produk	x	√	√	√	√	√
		2	Pelatihan Teknis Pengembangan Aneka Produk Berbasis Hasil Pertanian dan Agro	√	√	√	√	√	√
		3	Pelatihan Teknis Manajemen Mutu Produk Olahan Pangan	√	√	√	√	√	√
		4	Pelatihan Tehnis Diverifikasi Produk Kerajinan Berbasis Serat Alam	√	√	√	√	√	x
		5	Pelatihan Kewirausahaan Model CEFE	√	√	√	√	√	√
		6	Pelatihan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi pelaku industri	√	√	√	√	√	√
		7	Pelatihan Teknis Pengembangan aneka Produk Kerajina Berbasis Limbah	√	√	√	√	√	x
		8	study teknologi Pengembangan Kemasan	√	√	√	√	√	x
		9	Forum Komunikasi dan Temu Usaha Pelaku Industri	√	√	√	√	√	√

NO	PROGRAM	KEGIATAN		RENSTRA	RENJA	RKPD	RKA	DPA	DPAP
1	2	3		4	5	6	7	8	9
		10	Rekrutmen Peserta Pelatihan CEFE	√	√	√	√	√	√
		11	Bimbingan dan Pelatihan Pasca Pelatihan	√	√	√	√	√	√
		12	Pelayanan Desain Merek dan Kemasan	√	√	√	√	√	√
		13	Partisipasi pada Pameran Dalam, Nasional dan Luar Negeri	√	√	√	√	√	√
<b>V</b>	<b>UNIT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG</b>								
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	√	√	√	√	√	√
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	√	√	√	√	√	√
		3	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	√	√	√	√	√	√
		4	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	√	√	√	√	√	√
		5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	√	√	√	√	√	√
		6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	√	√	√	√	√	√
		7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	√	√	√	√	√	√
		8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	√	√	√	√	√	√
		9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	√	√	√	√	√	√
		10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	√	√	√	√	√	√
		11	Penyediaan Makanan dan Minuman	√	√	√	√	√	√
		12	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	√	√	√	√	√	√

NO	PROGRAM	KEGIATAN		RENSTRA	RENJA	RKPD	RKA	DPA	DPAP
1	2	3		4	5	6	7	8	9
		13	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	√	√	√	√	√	√
		14	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	√	√	√	√	√	√
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	1	Pembangunan Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus	√	√	√	√	√	√
		2	Pengadaan AC/Kipas Angin	√	√	√	√	√	√
		3	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	√	√	√	√	√	√
		4	Pengadaan/Peningkatan Instalasi Listrik/Telepon	√	√	√	√	√	√
		5	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	√	√	√	√	√	√
		6	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	√	√	√	√	√	√
		7	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	√	√	√	√	√	√
		8	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	√	√	√	√	√	√
		9	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	√	√	√	√	√	√
		10	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	√	√	√	√	√	√

NO	PROGRAM	KEGIATAN	RENSTRA	RENJA	RKPD	RKA	DPA	DPAP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		11	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	√	√	√	√	√	√
		12	Pengadaan Generator	√	√	√	√	√	√
		13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gudang	√	√	√	√	√	X
		14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus	√	√	√	√	√	√
		15	Pemeliharaan rutin/berkala generetor	√	√	√	√	√	√
		16	Rehabilitasi/peningkatan gedung khusus/bangunan khusus/konstruksi khusus	√	√	√	√	√	√
		17	Peningkatan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	√	√	√	√	√	√
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	1	Pengadaan pakaian dinas/kerja dan perlengkapannya	√	√	√	√	√	√
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	1	Pendidikan dan Pelatihan	√	√	√	√	√	√
		2	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	√	√	√	√	√	√
		3	Penyusunan Analisis Jabatan	√	√	√	√	√	X
5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN	1	Penyusunan Laporan Keuangan	√	√	√	√	√	√
		2	Penyusunan LAKIP	√	√	√	√	√	√
		3	Penyusunan RENJA SKPD	√	√	√	√	√	√

NO	PROGRAM	KEGIATAN		RENSTRA	RENJA	RKPD	RKA	DPA	DPAP
1	2	3		4	5	6	7	8	9
	SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	4	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	√	√	√	√	√	√
6	PROGRAM PENINGKATAN EKSPOR DAN PENGENDALIAN IMPOR	1	Evaluasi Sistem Manajemen Mutu ISO : 17025	√	√	√	√	√	√
		2	Audit Eksternal	√	√	√	√	√	√
		3	Promosi Pelayanan UPSMB	√	√	√	√	√	√
		4	Pelayanan Kalibrasi Alat Ukur	√	√	√	√	√	√
		5	Kalibrasi Peralatan Standard	√	√	√	√	√	√
		6	Jaminan Mutu Hasil Pengujian dan Kalibrasi	√	√	√	√	√	√
		7	Pengujian Mutu Produk Komoditi Unggulan	√	√	√	√	√	√
		8	Pengambilan dan Pengujian Mutu Produk Wajib SNI di Kab/Kota	√	√	√	√	√	√
		9	Jejaring Kerjasama dan Pengembangan Wawasan Pengelolaan Laboratorium	√	√	√	√	√	√

## F.2 Perda Pelaksanaan Peraturan Menteri

**Tidak ada** Perda yang diterbitkan pada Tahun 2018 sebagai penjabaran atas Peraturan Menteri yang telah ditetapkan. Namun Dinas Perindag Prov. Kalbar mendorong untuk Pemda Kab/Kota agar segera menyelesaikan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK) sebagai implementasi terhadap penetapan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 serta Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Kalimantan Barat.

## **BAB III URUSAN DESENTRALISASI**

### **A. Ringkasan Urusan Desentralisasi**

#### **A.1 Ringkasan Urusan Dinas Perindag Prov. Kalbar**

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan 2 urusan pilihan yaitu Perdagangan dan Industri dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018 yaitu :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 17 (tujuh belas) Kegiatan;
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana terdiri dari 10 (sepuluh) Kegiatan;
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari 6 (enam) Kegiatan;
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 8 (delapan) Kegiatan;
- e. Program Peningkatan Pengelolaan Asset Daerah terdiri dari 1 (satu) Kegiatan;
- f. Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Dan Perlindungan Konsumen terdiri dari 11 (sebelas) Kegiatan;
- g. Program Peningkatan Ekspor Dan Pengendalian Impor terdiri dari 6 (enam) Kegiatan;
- h. Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri terdiri dari 17 (tujuh belas) Kegiatan;
- i. Program Dukungan Manajemen Pengembangan Industri Dan Perdagangan Daerah terdiri dari 1 (satu) Kegiatan.

#### **A.2 Ringkasan Urusan UP IPOK**

Unit Pelatihan Industri Pangan Olahan dan Kemasan (UP IPOK ), merupakan unit yang mengakomodir urusan Industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat dengan Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018 yaitu :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 13 (tiga belas) Kegiatan;
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana terdiri dari 7 (tujuh) Kegiatan;
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari 6 (enam) Kegiatan;
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 4 (empat) Kegiatan;



- e. Program Peningkatan Pengelolaan Asset Daerah terdiri dari 1 (satu) Kegiatan;
- f. Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri terdiri dari 10 (sepuluh) Kegiatan;

### **A.3 Ringkasan Urusan UPSMB**

Unit Pengawasan Dan Sertifikasi Mutu Barang (UPSMB) merupakan unit yang mengakomodir urusan Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018 yaitu :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 14 (empat belas) Kegiatan;
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana terdiri dari 16 (enam belas) Kegiatan;
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri dari 1 (satu) Kegiatan;
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari 3 (tiga) Kegiatan;
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 4 (empat) Kegiatan;
- f. Program Peningkatan Ekspor Dan Pengendalian Impor terdiri dari 9 (sembilan) Kegiatan.

## B. Anggaran Belanja dan Realisasi OPD dan UPTD Dinas Perindag Prov. Kalbar

Tabel 5. Total Anggaran dan Realisasi Belanja T.A. 2018

KODE REKENING	INSTANSI DAN ORGANISASI	ANGGARAN BELANJA	REALISASI				TOTAL REALISASI BELANJA	%
			REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG	JENIS BELANJA				
				PEMELIHARAAN	BARANG DAN JASA	MODAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>TOTAL BELANJA</b>		<b>23.250.107.178</b>	<b>12.771.183.453</b>	<b>404.253.849</b>	<b>8.459.505.941</b>	<b>946.621.600</b>	<b>22.581.564.843</b>	<b>97,12</b>
<b>BELANJA TDAK LANGSUNG</b>		<b>12.853.565.059</b>	<b>12.771.183.453</b>	-	-	-	<b>12.771.183.453</b>	<b>99,36</b>
<b>BELANJA LANGSUNG</b>		<b>10.396.542.119</b>	-	<b>404.253.849</b>	<b>8.459.505.941</b>	<b>946.621.600</b>	<b>9.810.381.390</b>	<b>94,36</b>
2.06.01.01	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	6.943.136.454	-	243.785.250	5.898.501.073	323.012.000	6.465.298.323	93,12
2.06.01.02	UNIT PELATIHAN INDUSTRI PENGAN OLAHAN DAN KEMASAN	1.580.775.048	-	41.938.804	1.461.137.574	-	1.503.076.378	95,08
2.06.01.05	UNIT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG	1.872.630.618	-	160.468.599	1.057.928.490	623.609.600	1.842.006.689	98,36

Sumber : Laporan realisasi fisik dan keuangan Dinas Perindag Prov. Kalbar 2018

Tabel 6. Uraian Anggaran dan Realisasi Belanja T.A. 2018

KODE REKENING	INSTANSI DAN ORGANISASI	ANGGARAN BELANJA	REALISASI				TOTAL REALISASI BELANJA	%
			REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG	JENIS BELANJA				
				PEMELIHARAAN	BARANG DAN JASA	MODAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>TOTAL BELANJA</b>		<b>23.250.107.178</b>	<b>12.771.183.453</b>	<b>404.253.849</b>	<b>8.459.505.941</b>	<b>946.621.600</b>	<b>22.581.564.843</b>	<b>97,12</b>
	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>12.853.565.059</b>	<b>12.771.183.453</b>	-	-	-	<b>12.771.183.453</b>	<b>99,36</b>
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>10.396.542.119</b>	-	<b>404.253.849</b>	<b>8.459.505.941</b>	<b>946.621.600</b>	<b>9.810.381.390</b>	<b>94,36</b>
<b>2.06.01.01</b>	<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>	<b>6.943.136.454</b>	-	<b>243.785.250</b>	<b>5.898.501.073</b>	<b>323.012.000</b>	<b>6.465.298.323</b>	<b>93,12</b>
<b>2.06.2.06.01.01.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>1.594.519.690</b>	-	-	<b>1.530.379.384</b>	-	<b>1.530.379.384</b>	<b>95,98</b>
2.06.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600.000	-	-	592.000	-	592.000	98,67
2.06.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	321.123.263	-	-	269.915.679	-	269.915.679	84,05
2.06.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	3.500.000	-	-	3.499.928	-	3.499.928	100,00
2.06.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	14.215.000	-	-	14.208.209	-	14.208.209	99,95
2.06.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	5.607.000	-	-	5.600.000	-	5.600.000	99,88
2.06.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	191.800.000	-	-	191.799.000	-	191.799.000	100,00
2.06.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis kantor	53.782.500	-	-	53.702.500	-	53.702.500	99,85
2.06.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	46.500.000	-	-	46.450.000	-	46.450.000	99,89
2.06.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	8.000.000	-	-	8.000.000	-	8.000.000	100,00

KODE REKENING	INSTANSI DAN ORGANISASI	ANGGARAN BELANJA	REALISASI				TOTAL REALISASI BELANJA	%
			REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG	JENIS BELANJA				
				PEMELIHARAAN	BARANG DAN JASA	MODAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.06.01.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	12.000.000	-	-	12.000.000	-	12.000.000	100,00
2.06.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	9.000.000	-	-	8.960.000	-	8.960.000	99,56
2.06.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	25.000.000	-	-	24.845.000	-	24.845.000	99,38
2.06.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	271.287.190	-	-	267.035.380	-	267.035.380	98,43
2.06.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/ Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	453.078.737	-	-	451.695.688	-	451.695.688	99,69
2.06.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	120.000.000	-	-	116.400.000	-	116.400.000	97,00
2.06.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	22.500.000	-	-	19.150.000	-	19.150.000	85,11
2.06.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	36.526.000	-	-	36.526.000	-	36.526.000	100,00
					-			
<b>2.06.01.01.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>434.687.750</b>	-	<b>243.785.250</b>	<b>42.745.123</b>	<b>143.502.000</b>	<b>430.032.373</b>	<b>98,93</b>
2.06.2.06.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Kantor	52.000.000	-	-	-	49.930.000	49.930.000	96,02
2.06.2.06.01.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	-	-	-	-	-	-	0,00
2.06.2.06.01.01.02.15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	122.400.000	-	121.527.000	800.000	-	122.327.000	99,94
2.06.2.06.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin./Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	65.100.000	-	39.850.500	24.945.123	-	64.795.623	99,53
2.06.2.06.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin/Berkala AC/Kipas Angin	10.892.750	-	10.892.750	-	-	10.892.750	100,00

KODE REKENING	INSTANSI DAN ORGANISASI	ANGGARAN BELANJA	REALISASI				TOTAL REALISASI BELANJA	%
			REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG	JENIS BELANJA				
				PEMELIHARAAN	BARANG DAN JASA	MODAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.06.2.06.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan/Peralatan kantor	24.000.000	-	23.400.000	-	-	23.400.000	97,50
2.06.2.06.01.01.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	5.800.000	-	5.800.000	-	-	5.800.000	100,00
2.06.2.06.01.01.02.23	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	39.500.000	-	22.400.000	17.000.000	-	39.400.000	99,75
2.06.2.06.01.01.02.34	Pembangunan Plank Nama Kantor	44.995.000	-	-	-	44.940.000	44.940.000	99,88
2.06.2.06.01.01.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik/Telepon	20.000.000	-	19.915.000	-	-	19.915.000	99,58
2.06.2.06.01.01.02.86	Peningkatan Jalan/Jembatan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan	50.000.000	-	-	-	48.632.000	48.632.000	97,26
						-		
<b>2.06.2.06.01.01.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	-	-	-	-	-	-	<b>0,00</b>
2.06.2.06.01.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	-	-	-	-	-	-	0,00
						-		
<b>2.06.2.06.01.01.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>254.997.631</b>	-	-	<b>253.386.881</b>	-	<b>253.386.881</b>	<b>99,37</b>
2.06.2.06.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	136.300.000	-	-	136.169.500	-	136.169.500	99,90
2.06.2.06.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	27.000.000	-	-	26.474.000	-	26.474.000	98,05
2.06.2.06.01.01.05.03	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	39.362.631	-	-	39.358.381	-	39.358.381	99,99
2.06.2.06.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	33.875.000	-	-	33.875.000	-	33.875.000	100,00
2.06.2.06.01.01.05.05	Penyusunan Analisa Jabatan	10.160.000	-	-	9.360.000	-	9.360.000	92,13

KODE REKENING	INSTANSI DAN ORGANISASI	ANGGARAN BELANJA	REALISASI				TOTAL REALISASI BELANJA	%
			REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG	JENIS BELANJA				
				PEMELIHARAAN	BARANG DAN JASA	MODAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.06.2.06.01.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	8.300.000	-	-	8.150.000	-	8.150.000	98,19
					-			
<b>2.06.2.06.01.01.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>123.376.600</b>	-	-	<b>121.631.600</b>	-	<b>121.631.600</b>	<b>98,59</b>
2.06.2.06.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	13.950.000	0	0	13950000	0	13.950.000	100
2.06.2.06.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	20.500.000	-	-	20.220.000	-	20.220.000	98,63
2.06.2.06.01.01.06.03	Penyusunan RENSTRA	-	-	-	-	-	-	0,00
2.06.2.06.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	19.314.800	-	-	19.314.800	-	19.314.800	100,00
2.06.2.06.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	22.700.000	-	-	21.235.000	-	21.235.000	93,55
2.06.2.06.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	-	-	-	-	-	-	0,00
2.06.2.06.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	30.145.600	-	-	30.145.600	-	30.145.600	100,00
2.06.2.06.01.01.06.09	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	16.766.200	-	-	16.766.200	-	16.766.200	100,00
					-			
<b>2.06.2.06.01.01.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>13.065.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13050000</b>	<b>0</b>	<b>13.050.000</b>	<b>99,8852</b>
2.06.2.06.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	13.065.000	-	-	13.050.000	-	13.050.000	99,89
					-			
<b>2.06.2.06.01.01.15</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI</b>	<b>840.846.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>720887300</b>	<b>0</b>	<b>720.887.300</b>	<b>85,7308</b>

KODE REKENING	INSTANSI DAN ORGANISASI	ANGGARAN BELANJA	REALISASI				TOTAL REALISASI BELANJA	%
			REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG	JENIS BELANJA				
				PEMELIHARAAN	BARANG DAN JASA	MODAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>							
2.06.2.06.01.01.15.01	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Pasar di Kabupaten/Kota	46.150.300	-	-	29.260.600	-	29.260.600	63,40
2.06.2.06.01.01.15.02	Pameran Produk Dalam Negeri	4.971.000	-	-	4.911.000	-	4.911.000	98,79
2.06.2.06.01.01.15.03	Penyelenggaraan Pasar Murah Menghadapi Hari Besar Keagamaan	256.405.000	-	-	255.893.600	-	255.893.600	99,80
2.06.2.06.01.01.15.04	Monitoring Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	76.250.000	-	-	63.928.000	-	63.928.000	83,84
2.06.2.06.01.01.15.05	Pengawasan Barang Beredar	181.313.250	-	-	175.880.500	-	175.880.500	97,00
2.06.2.06.01.01.15.06	Penyusunan Produk Hukum Bidang Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen	21.245.000	-	-	-	-	-	0,00
2.06.2.06.01.01.15.07	Seleksi dan Pengangkatan Anggota dan Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	117.715.000	0	0	85.100.000	-	85.100.000	72,2933
2.06.2.06.01.01.15.08	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi BPSK	30.169.000	-	-	28.578.600	-	28.578.600	94,64
2.06.2.06.01.01.15.09	Monitoring dan Pembinaan Perdagangan Barang Dalam Pengawasan	55.612.500	-	-	32.395.000	-	32.395.000	58,25
2.06.2.06.01.01.15.10	Pengumpulan dan Pengolahan Data SIUP, TDP dan TDG	-	-	-	-	-	-	0,00
2.06.2.06.01.01.15.11	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penerapan Sistem Resi Gudang	27.515.000	-	-	22.440.000	-	22.440.000	81,56
2.06.2.06.01.01.15.12	Rapat Koordinasi Kesiapan Barang Kebutuhan Pokok Menjelang HBKN	23.500.000	-	-	22.500.000	-	22.500.000	95,74
		-			-			

KODE REKENING	INSTANSI DAN ORGANISASI	ANGGARAN BELANJA	REALISASI				TOTAL REALISASI BELANJA	%
			REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG	JENIS BELANJA				
				PEMELIHARAAN	BARANG DAN JASA	MODAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>2.06.2.06.01.01.16</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN EKSPOR DAN PENGENDALIAN IMPOR</b>	<b>536.063.575</b>	-	-	<b>445.170.349</b>	-	<b>445.170.349</b>	<b>83,04</b>
2.06.2.06.01.01.16.01	Pembinaan Perdagangan Lintas Batas	87.977.775	-	-	59.466.849	-	59.466.849	67,59
2.06.2.06.01.01.16.02	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Importir	-	-	-	-	-	-	0,00
2.06.2.06.01.01.16.03	Forum Kerjasama Regional (Sosek-Malindo dan BIMP-EAGA)	32.142.000	0	0	12.147.000	-	12.147.000	37,7917
2.06.2.06.01.01.16.04	Partisipasi Pada Pameran Produk Ekspor dan Promosi Dagang di Luar Negeri	162.401.800	-	-	135.790.400	-	135.790.400	83,61
2.06.2.06.01.01.16.05	Partisipasi Pada Pameran Produk Ekspor Daerah (PPED)	200.279.000	-	-	189.213.100	-	189.213.100	94,47
2.06.2.06.01.01.16.06	Forum Kerjasama Peningkatan Ekspor Daerah	44.000.000	0	0	39.290.000	-	39.290.000	89,2955
2.06.2.06.01.01.16.07	Peningkatan Informasi Ekspor dan Impor	9.263.000	-	-	9.263.000	-	9.263.000	100,00
					-			
<b>2.06.2.06.01.01.17</b>	<b>PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI</b>	<b>2.841.255.658</b>	-	-	<b>2.496.338.636</b>	<b>179.510.000</b>	<b>2.675.848.636</b>	<b>94,18</b>
2.06.2.06.01.01.17.01	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Pangan	191.496.050	0	0	185.570.200	-	185.570.200	96,9055
2.06.2.06.01.01.17.02	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Tekstil dan Aneka	97.725.100	-	-	97.513.200	-	97.513.200	99,78
2.06.2.06.01.01.17.03	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Hasil Hutan (kayu)	53.855.000	-	-	53.335.800	-	53.335.800	99,04
2.06.2.06.01.01.17.04	Penumbuhan dan Pembangunan Perwilayahan Industri Kalbar	235.917.775	-	-	226.920.750	-	226.920.750	96,19
2.06.2.06.01.01.17.05	Penumbuhan dan Pembangunan SIKIM di Kalbar	-	-	-	-	-	-	0,00



KODE REKENING	INSTANSI DAN ORGANISASI	ANGGARAN BELANJA	REALISASI				TOTAL REALISASI BELANJA	%
			REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG	JENIS BELANJA				
				PEMELIHARAAN	BARANG DAN JASA	MODAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.06.2.06.01.01.17.06	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Hasil Tanaman Pangan di Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	0,00
2.06.2.06.01.01.17.07	Pengembangan Industri Hilir Karet Berbasis Latek Pekat di Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	0,00
2.06.2.06.01.01.17.08	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Hilir Sawit Non Pangan	-	-	-	-	-	-	0,00
2.06.2.06.01.01.17.09	Pengembangan Industri Elektronika dan Telematika	63.810.500	-	-	62.379.000	-	62.379.000	97,76
2.06.2.06.01.01.17.10	Pengembangan Industri Alat Angkut (Alat Transportasi dan Maritim)	62.310.700	-	-	62.099.500	-	62.099.500	99,66
2.06.2.06.01.01.17.11	Pembinaan dan Pengembangan Industri Hilirisasi Tambang Bauksit	58.903.300	0	0	58.016.600	-	58.016.600	98,4947
2.06.2.06.01.01.17.12	Pengembangan Sumber Daya Industri	91.624.000	-	-	85.502.200	-	85.502.200	93,32
2.06.2.06.01.01.17.13	Pengembangan industri Alsintan Center	122.190.000	-	-	116.920.000	-	116.920.000	95,69
2.06.2.06.01.01.17.14	Partisipasi Promosi dan Pameran Produk Unggulan IKM di Dalam dan Luar Negeri.	170.840.083	-	-	158.472.886	-	158.472.886	92,76
2.06.2.06.01.01.17.16	Pembinaan & Pengembangan Industri Berbasis One Village One Product	88.432.150	-	-	85.364.300	-	85.364.300	96,53
2.06.2.06.01.01.17.17	Pemutakhiran Data IKM	-	-	-	-	-	-	0,00
2.06.2.06.01.01.17.18	Monitoring / Pembinaan IKM	23.506.000	-	-	14.551.000	-	14.551.000	61,90
2.06.2.06.01.01.17.19	Study Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri	-	0	0	-	-	-	0
2.06.2.06.01.01.17.20	Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) Pangan	686.065.000	-	-	583.020.100	-	583.020.100	84,98

KODE REKENING	INSTANSI DAN ORGANISASI	ANGGARAN BELANJA	REALISASI				TOTAL REALISASI BELANJA	%
			REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG	JENIS BELANJA				
				PEMELIHARAAN	BARANG DAN JASA	MODAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.06.2.06.01.01.17.21	Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) Konveksi dan Percetakan	452.555.000	-	-	449.089.000	-	449.089.000	99,23
2.06.2.06.01.01.17.22	Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) Furniture	94.800.000	-	-	92.010.100	-	92.010.100	97,06
2.06.2.06.01.01.17.23	Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) Logam	167.225.000	-	-	165.574.000	-	165.574.000	99,01
2.06.2.06.01.01.17.37	Pembangunan Aplikasi Sistem Informasi Sentra Layanan IKM dan Market Place	180.000.000	-	-	-	179.510.000	179.510.000	99,73
					-			
<b>2.06.2.06.01.01.19</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN PENGEMBANGAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN DAERAH</b>	<b>304.324.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274.911.800</b>	<b>-</b>	<b>274.911.800</b>	<b>90,3351</b>
2.06.2.06.01.01.19.01	Rapat Kerja Industri dan Perdagangan se-Kalbar serta Singkronisasi Program/Kegiatan Pusat dan Daerah	304.324.500	-	-	274.911.800	-	274.911.800	90,34
2.06.2.06.01.01.19.02	Penyusunan Data Spasial Bidang Indag Kalbar	-	-	-	-	-	-	0,00
<b>2.06.01.02</b>	<b>UNIT PELATIHAN INDUSTRI PANGAN OLAHAN DAN KEMASAN</b>	<b>1.580.775.048</b>	<b>-</b>	<b>41.938.804</b>	<b>1.461.137.574</b>	<b>-</b>	<b>1.503.076.378</b>	<b>95,08</b>
<b>2.06.2.06.01.03.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>727.004.298</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>675.177.175</b>	<b>-</b>	<b>675.177.175</b>	<b>92,87</b>
2.06.2.06.01.03.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.000.000	-	-	38.673.087	-	38.673.087	77,35
2.06.2.06.01.03.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	11.500.000	-	-	10.728.091	-	10.728.091	93,29
2.06.2.06.01.03.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	1.000.000	-	-	997.500	-	997.500	99,75

KODE REKENING	INSTANSI DAN ORGANISASI	ANGGARAN BELANJA	REALISASI				TOTAL REALISASI BELANJA	%
			REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG	JENIS BELANJA				
				PEMELIHARAAN	BARANG DAN JASA	MODAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.06.2.06.01.03.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	3.000.000	-	-	2.675.000	-	2.675.000	89,17
2.06.2.06.01.03.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	80.000.000	-	-	79.421.000	-	79.421.000	99,28
2.06.2.06.01.03.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	38.500.000	-	-	38.500.000	-	38.500.000	100,00
2.06.2.06.01.03.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000	-	-	20.000.000	-	20.000.000	100,00
2.06.2.06.01.03.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.550.000	-	-	3.550.000	-	3.550.000	100,00
2.06.2.06.01.03.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUndang-Undangan	4.250.000	-	-	3.430.000	-	3.430.000	80,71
2.06.2.06.01.03.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	3.600.000	-	-	3.270.000	-	3.270.000	90,83
2.06.2.06.01.03.01.14	Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah	151.241.142	-	-	117.078.993	-	117.078.993	77,41
2.06.2.06.01.03.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	293.163.156	-	-	292.653.504	-	292.653.504	99,83
2.06.2.06.01.03.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	67.200.000	-	-	64.200.000	-	64.200.000	95,54
					-			
<b>2.06.2.06.01.03.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>52.000.000</b>	-	<b>41.938.804</b>	-	-	<b>41.938.804</b>	<b>80,65</b>
2.06.2.06.01.03.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	-	-	-	-	-	-	0,00
2.06.2.06.01.03.02.13	Pengadaan sarana/prasarana pendukung gedung kantor	-	-	-	-	-	-	
2.06.2.06.01.03.02.15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	10.000.000	-	10.000.000	-	-	10.000.000	100,00

KODE REKENING	INSTANSI DAN ORGANISASI	ANGGARAN BELANJA	REALISASI				TOTAL REALISASI BELANJA	%
			REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG	JENIS BELANJA				
				PEMELIHARAAN	BARANG DAN JASA	MODAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.06.2.06.01.03.02.18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	20.000.000	-	15.237.204	-	-	15.237.204	76,19
2.06.2.06.01.03.02.20	Pemeliharaan Rutin/Berkala AC/Kipas Angin	10.000.000	-	8.025.000	-	-	8.025.000	80,25
2.06.2.06.01.03.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Kantor	10.000.000	-	8.676.600	-	-	8.676.600	86,77
2.06.2.06.01.03.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	2.000.000	-	-	-	-	-	0,00
					0			
<b>2.06.2.06.01.03.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>34.200.500</b>	-	-	<b>34.100.500</b>	-	<b>34.100.500</b>	<b>99,71</b>
2.06.2.06.01.03.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	9.700.500	-	-	9.700.500	-	9.700.500	100,00
2.06.2.06.01.03.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Workshop	5.500.000	-	-	5.400.000	-	5.400.000	98,18
2.06.2.06.01.03.05.05	Penyusun Analisis Jabatan	8.000.000	-	-	8.000.000	-	8.000.000	100,00
2.06.2.06.01.03.05.06	Penetapan Kinerja	5.500.000	-	-	5.500.000	-	5.500.000	100
2.06.2.06.01.03.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	5.500.000	-	-	5.500.000	-	5.500.000	100,00
2.06.2.06.01.03.05.08	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-	-	-	-	0,00
					-			
<b>2.06.2.06.01.03.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>53.350.000</b>	-	-	<b>53.213.000</b>	-	<b>53.213.000</b>	<b>99,74</b>
2.06.2.06.01.03.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	16.500.000	-	-	16.500.000	-	16.500.000	100,00
2.06.2.06.01.03.06.02	Penyusunan LAKIP							98,4432

KODE REKENING	INSTANSI DAN ORGANISASI	ANGGARAN BELANJA	REALISASI				TOTAL REALISASI BELANJA	%
			REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG	JENIS BELANJA				
				PEMELIHARAAN	BARANG DAN JASA	MODAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		8.800.000	-	-	8.663.000	-	8.663.000	
2.06.2.06.01.03.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	13.750.000	-	-	13.750.000	-	13.750.000	100,00
2.06.2.06.01.03.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	14.300.000	-	-	14.300.000	-	14.300.000	100,00
					0			
<b>2.06.2.06.01.03.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>10.000.000</b>	-	-	<b>10.000.000</b>	-	<b>10.000.000</b>	<b>100</b>
2.06.2.06.01.03.07.01	Penyusunan / Inventarisasi Aset	10.000.000	-	-	10.000.000	-	10.000.000	100
					-			
<b>2.07.2.06.01.03.17</b>	<b>PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI</b>	<b>704.220.250</b>	-	-	<b>688.646.899</b>	-	<b>688.646.899</b>	<b>97,79</b>
2.07.2.06.01.03.17.24	Pelatihan Teknis Pengembangan Desain Kemasan Produk	60.000.000	-	-	59.999.999	-	59.999.999	100
2.07.2.06.01.03.17.25	Pelatihan Teknis Pengembangan Aneka Produk Berbasis Hasil Pertanian dan Agro	48.550.000	-	-	48.550.000	-	48.550.000	100
2.07.2.06.01.03.17.26	Pelatihan Teknis Manajemen Mutu Produk Olahan Pangan	33.500.000	-	-	33.500.000	-	33.500.000	100
2.07.2.06.01.03.17.27	Pelatihan Tehnis Diverifikasi Produk Kerajinan Berbasis Serat Alam	-	-	-	-	-	-	0,00
2.07.2.06.01.03.17.28	Pelatihan Kewirausahaan Model CEFE	181.500.000	-	-	181.500.000	-	181.500.000	100,00
2.07.2.06.01.03.17.29	Pelatihan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi pelaku industri	62.300.000	-	-	61.390.000	-	61.390.000	98,54
2.07.2.06.01.03.17.30	Pelatihan Teknis Pengembangan aneka Produk Kerajina Berbasis Limbah	-	-	-	-	-	-	0,00
2.07.2.06.01.03.17.31	study teknologi Pengembangan Kemasan	-	-	-	-	-	-	0,00

KODE REKENING	INSTANSI DAN ORGANISASI	ANGGARAN BELANJA	REALISASI				TOTAL REALISASI BELANJA	%
			REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG	JENIS BELANJA				
				PEMELIHARAAN	BARANG DAN JASA	MODAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.07.2.06.01.03.17.32	Forum Komunikasi dan Temu Usaha Pelaku Industri	34.500.000	-	-	34.500.000	-	34.500.000	100,00
2.07.2.06.01.03.17.33	Rekrutmen Peserta Pelatihan CEFE	18.800.000	-	-	18.800.000	-	18.800.000	100,00
2.07.2.06.01.03.17.34	Bimbingan dan Pelatihan Pasca Pelatihan	69.840.000	-	-	63.997.000	-	63.997.000	91,63
2.07.2.06.01.03.17.35	Pelayanan Desain Merek dan Kemasan	125.764.250	-	-	116.943.900	-	116.943.900	92,99
2.07.2.06.01.03.17.36	Partisipasi pada Pameran Dalam, Nasional dan Luar Negeri	69.466.000	-	-	69.466.000	-	69.466.000	100,00
<b>2.06.01.04</b>	<b>UPT. PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG</b>	<b>1.872.630.618</b>	<b>-</b>	<b>160.468.599</b>	<b>1.057.928.490</b>	<b>623.609.600</b>	<b>1.842.006.689</b>	<b>98,36</b>
<b>2.06.01.04.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>602.602.668</b>		<b>-</b>	<b>589.025.620</b>	<b>-</b>	<b>589.025.620</b>	<b>97,75</b>
2.06.01.04.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000.000		-	7.015.000	-	7.015.000	87,69
2.06.01.04.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	117.277.742		-	110.424.635	-	110.424.635	94,16
2.06.01.04.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	15.000.000		-	14.968.762	-	14.968.762	99,79
2.06.01.04.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	2.630.000		-	2.471.900	-	2.471.900	93,99
2.06.01.04.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	3.020.000		-	2.851.500	-	2.851.500	94,42
2.06.01.04.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	120.650.000		-	120.537.000	-	120.537.000	99,91
2.06.01.04.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	30.097.000		-	30.081.500	-	30.081.500	99,95
2.06.01.04.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.675.000		-	21.662.500	-	21.662.500	99,94

KODE REKENING	INSTANSI DAN ORGANISASI	ANGGARAN BELANJA	REALISASI				TOTAL REALISASI BELANJA	%
			REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG	JENIS BELANJA				
				PEMELIHARAAN	BARANG DAN JASA	MODAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.06.01.04.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	3.465.000		-	3.463.639	-	3.463.639	99,96
2.06.01.04.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.080.000		-	1.025.000	-	1.025.000	94,91
2.06.01.04.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	15.400.000		-	13.870.200	-	13.870.200	90,07
2.06.01.04.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	34.200.750		-	30.824.800	-	30.824.800	90,13
2.06.01.04.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	159.907.176		-	159.629.184	-	159.629.184	99,83
2.06.01.04.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	70.200.000		-	70.200.000	-	70.200.000	100,00
					-			
<b>2.06.01.04.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>878.108.500</b>		<b>160.468.599</b>	<b>88.016.000</b>	<b>623.609.600</b>	<b>872.094.199</b>	<b>99,32</b>
2.06.01.04.02.03	Pembangunan Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus	28.150.000		-	-	27.190.000	27.190.000	96,59
2.06.01.04.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	30.350.000		-	-	30.150.000	30.150.000	99,34
2.06.01.04.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	45.712.000		-	-	44.900.000	44.900.000	98,22
2.06.01.04.02.10	Pengadaan/Peningkatan Instalasi Listrik/Telepon	48.650.000		-	-	48.583.000	48.583.000	99,86
2.06.01.04.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	35.650.000		34.670.000	650.000	-	35.320.000	99,07
2.06.01.04.02.16	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	40.650.000		39.748.000	650.000	-	40.398.000	99,38

KODE REKENING	INSTANSI DAN ORGANISASI	ANGGARAN BELANJA	REALISASI				TOTAL REALISASI BELANJA	%
			REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG	JENIS BELANJA				
				PEMELIHARAAN	BARANG DAN JASA	MODAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.06.01.04.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	20.650.000		19.734.000	650.000	-	20.384.000	98,71
2.06.01.04.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	31.926.500		31.860.029	-	-	31.860.029	99,79
2.06.01.04.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	9.400.000		9.110.000	-	-	9.110.000	96,91
2.06.01.04.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	11.700.000		11.700.000	-	-	11.700.000	100,00
2.06.01.04.02.39	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	146.950.000		-	86.066.000	60.390.000	146.456.000	99,66
2.06.01.04.02.44	Pengadaan Generator	191.150.000		-	-	190.649.600	190.649.600	99,74
2.06.01.04.02.50	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gudang	-		-	-	-	-	-
2.06.01.04.02.62	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus	10.000.000		9.649.000	-	-	9.649.000	96,49
2.06.01.04.02.65	Pemeliharaan rutin/berkala generetor	4.145.000		3.997.570	-	-	3.997.570	96,44
2.06.01.04.02.76	Rehabilitasi/peningkatan gedung khusus/bangunan khusus/konstruksi khusus	117.525.000		-	-	116.697.000	116.697.000	99,30
2.06.01.04.02.86	Peningkatan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	105.500.000		-	-	105.050.000	105.050.000	99,57
						-		
<b>2.06.01.04.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>20.000.000</b>		-	<b>20.000.000</b>	-	<b>20.000.000</b>	<b>100,00</b>
2.06.01.04.03.01	Pengadaan pakaian dinas/kerja dan perlengkapannya	20.000.000		-	20.000.000	-	20.000.000	100,00



KODE REKENING	INSTANSI DAN ORGANISASI	ANGGARAN BELANJA	REALISASI				TOTAL REALISASI BELANJA	%
			REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG	JENIS BELANJA				
				PEMELIHARAAN	BARANG DAN JASA	MODAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					-			
<b>2.06.01.04.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>61.239.700</b>		-	<b>61.140.700</b>	-	<b>61.140.700</b>	<b>99,84</b>
2.06.01.04.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	49.889.700		-	<b>49.889.700</b>	-	49.889.700	100,00
2.06.01.04.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	11.350.000		-	<b>11.251.000</b>	-	11.251.000	99,13
2.06.01.04.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	-		-	-	-	-	-
					-			
<b>2.06.01.04.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>48.646.000</b>		-	<b>48.084.500</b>	-	<b>48.084.500</b>	<b>98,85</b>
2.06.01.04.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	13.638.000		-	13.538.000	-	13.538.000	99,27
2.06.01.04.06.02	Penyusunan LAKIP	8.060.000		-	8.059.000	-	8.059.000	99,99
2.06.01.04.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	11.517.000		-	11.057.000	-	11.057.000	96,01
2.06.01.04.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	15.431.000		-	15.430.500	-	15.430.500	100,00
					-			
<b>2.06.01.04.16</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN EKSPOR DAN PENGENDALIAN IMPOR</b>	<b>262.033.750</b>		-	<b>251.661.670</b>	-	<b>251.661.670</b>	<b>96,04</b>
2.06.01.04.16.08	Evaluasi Sistem Manajemen Mutu ISO : 17025	22.074.000		-	21.968.000	-	21.968.000	99,52
2.06.01.04.16.09	Audit Eksternal	23.550.000		-	19.969.000	-	19.969.000	84,79
2.06.01.04.16.10	Promosi Pelayanan UPSMB							

KODE REKENING	INSTANSI DAN ORGANISASI	ANGGARAN BELANJA	REALISASI				TOTAL REALISASI BELANJA	%
			REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG	JENIS BELANJA				
				PEMELIHARAAN	BARANG DAN JASA	MODAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		31.077.950		-	30.865.900	-	30.865.900	99,32
2.06.01.04.16.11	Pelayanan Kalibrasi Alat Ukur	23.602.000		-	23.367.000	-	23.367.000	99,00
2.06.01.04.16.12	Kalibrasi Peralatan Standard	60.316.500		-	56.653.510	-	56.653.510	93,93
2.06.01.04.16.13	Jaminan Mutu Hasil Pengujian dan Kalibrasi	25.992.000		-	25.756.660	-	25.756.660	99,09
2.06.01.04.16.14	Pengujian Mutu Produk Komoditi Unggulan	30.257.300		-	30.244.600	-	30.244.600	99,96
2.06.01.04.16.15	Pengambilan dan Pengujian Mutu Produk Wajib SNI di Kab/Kota	38.364.000		-	37.581.000	-	37.581.000	97,96
2.06.01.04.16.16	Jejaring Kerjasama dan Pengembangan Wawasan Pengelolaan Laboratorium	6.800.000		-	5.256.000	-	5.256.000	77,29

Sumber : Laporan realisasi fisik dan keuangan Dinas Perindag Prov. Kalbar 2018



## C. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Dinas Perindag Prov. Kalbar **tidak memiliki** SPM yang diamanatkan pada peraturan perundang-undangan, sehingga tidak ada tingkat pencapaian Standar Pelayanan minimal pada tahun 2018.

## D. Permasalahan dan Solusi

### D.1 Urusan Pilihan Perindustrian

#### Permasalahan :

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, perkembangan pembangunan sektor industri belum begitu menggembirakan jika dilihat dari tingkat pertumbuhan dimana rata-rata laju pertumbuhan sektor industri kalbar antara 3-4% yang hampir setiap tahunnya selalu dibawah rata-rata pertumbuhan Nasional. Hal tersebut dapat diartikan bahwa peran sektor industri terhadap PDRB total Kalimantan Barat terus mengalami penurunan yang cukup signifikan dimana kontribusi sektor industri juga belum mengalami peningkatan yang berada pada kisaran 16-17% dimana angka tersebut sangat jauh apabila dibandingkan dengan kontribusi pada tahun 2000 sebesar 24,15%.

Dalam garis besarnya permasalahan pembangunan urusan industri sehingga menyebabkan kondisi sektor industri dimaksud disebabkan oleh :

1. Menurunnya kinerja industri kayu dan lambannya perkembangan usaha industri pengolahan berbasis sumber daya alam lainnya (perkebunan, hasil pertanian lainnya dan pertambangan) yang hanya berbentuk industri hulu dimana peningkatan nilai tambahnya relatif sangat kecil.
2. Belum optimalnya pemberdayaan atau pengembangan pelaku industri kecil menengah di kalimantan barat. Hal tersebut disebabkan oleh belum optimalnya pembinaan, pendidikan, dan pelatihan bagi sumber daya manusia pada sektor industri. Selain itu, masih lemahnya kerjasama antara pemerintah – swasta – serta asosiasi-asosiasi yang bergerak pada sektor industri turut mempengaruhi lambannya pengembangan sektor industri kecil dan menengah
3. Belum Optimalnya infrastruktur energi dan sistem logistik perindustrian di Provinsi Kalimantan Barat, ini disebabkan oleh dua hal utama, pertama terbatasnya fasilitas-fasilitas utama dan penting bagi pertumbuhan dan perkembangan industri antara lain belum tersedianya kawasan industri serta sentra industri kecil dan menengah. Permasalahan tersebut sangat erat kaitannya dengan minimnya investasi pada sektor industri, belum optimalnya pengembangan perwilayahan industri, serta terbatasnya konektivitas pelaku usaha industri. Kedua masalah sarana prasana

pelabuhan, pasokan air bersih, serta infrastruktur yang masih terbatas serta belum mampu memenuhi standar industri;

**Solusi :**

1. Mempersiapkan fasilitas-fasilitas utama dan penting bagi pertumbuhan dan perkembangan industri serta sarana dan prasarana lainnya di Provinsi Kalimantan Barat yang diharapkan akan dapat meningkatkan investasi industri di Kalimantan Barat;
2. Meningkatkan nilai tambah produk (Hilirisasi) yang sejalan dengan perluasan pemasaran dan daya saing produk industri; peningkatan Inovasi, kapasitas dan efisiensi proses produksi; peningkatan kapasitas sumber daya manusia; serta peningkatan koordinasi antara pemerintah – swasta – serta asosiasi-asosiasi (dalam rangka pembinaan dan pengawasan usaha industri; serta perumusan kebijakan daerah untuk mendukung industri) sehingga dapat mendongkrak kontribusi sektor industri Kalbar;
3. Mendorong seluruh Pemerintah Kab/Kota untuk segera menyelesaikan Rencana Induk Pembangunan Industri (RPIK) yang selaras dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Kalimantan Barat, sehingga akan tercipta keselarasan dalam rencana pembangunan industri antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota baik dari sisi perencanaan dan pelaksanaan pengembangan dari sisi SDM, Sarana, dan prasarana industri;
4. Pendataan unit usaha Industri yang sesuai Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2015 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Namun dalam implementasinya, diketahui bahwa sangat diperlukannya pengelompokan industri terutama IKM berdasarkan potensi, skala pemasaran, kualitas, dan lain sebagainya untuk mempermudah pengambilan keputusan sebagai langkah kedepannya dalam penumbuhan, pembangunan dan pengembangan industri di Kalimantan Barat.

## D.2 Urusan Pilihan Perdagangan

### Permasalahan :

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir perkembangan sub sektor perdagangan luar negeri mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013 nilai ekspor tercatat sebesar US\$.1.348,61 juta, kemudian menurun pada tahun 2014 sebesar US\$.651,99 juta atau 51,65 persen, pada tahun 2015 nilai ekspor menurun sebesar US\$.565,96 juta. Kemudian pada tahun 2016 meningkat menjadi US\$.623,420 juta. Peningkatan ekspor Kalbar kembali dilanjutkan pada tahun 2017 sebesar US\$.203,88 juta atau sebesar 32,70 persen dengan nilai ekspor sebesar US\$.827,30 juta. Sedangkan pada tahun 2018, ekspor diperkirakan masih akan meningkat dibandingkan tahun 2017. Hal tersebut tergambar dari pencapaian ekspor sampai dengan bulan Agustus 2018 sebesar US\$.658,29 juta yang mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama pada tahun 2017 sebesar US\$.571,05 juta atau meningkat sebesar 15,27 persen.

Selanjutnya kekhawatiran terhadap penurunan kinerja ekspor daerah dalam tahun-tahun mendatang patut menjadi fokus perhatian, terkait dengan:

- Adanya kecenderungan semakin protektifnya perdagangan negara-negara Eropa dan Amerika Serikat terutama terhadap komoditi yang berasal dari Cina, Korea Selatan dan Jepang yang merupakan pasar tradisional utama ekspor Kalbar;
- Struktur ekspor Kalbar masih didominasi oleh 3 (tiga) komoditi utama yang bersifat primer yaitu karet, hasil tambang dan produk perikanan (diatas 80% nilai ekspor total Kalbar), sehingga perkembangan nilai ekspor Kalbar sangat rentan terhadap fluktuasi harga ketiga komoditi tersebut di pasar dunia;
- Pembatasan ekspor bahan tambang utamanya bauksit sebagai dampak kebijakan/ regulasi nasional;
- Belum maksimalnya pintu ekspor-impur resmi dan representative di daerah perbatasan yang jauh dari pelabuhan utama Pontianak untuk ekspor komoditi daerah pedalaman dan perbatasan yang didukung dengan fasilitas Good in Transit.

Dari sisi perdagangan dalam negeri dihadapkan dengan sistem logistik daerah yang belum efisien sehingga menyebabkan rentannya ketersediaan pasokan/stok dan fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting bagi masyarakat serta permasalahan rendahnya daya saing produk daerah akibat dari minimnya pemasaran. Permasalahan lainnya adalah tuntutan akan perlindungan konsumen bagi masyarakat yang semakin tinggi, dimana saat ini semakin banyak beredarnya barang dan jasa baik dari luar maupun dalam daerah yang dikonsumsi yang perlu diawasi peredarannya

### Solusi :

1. **Peningkatan nilai ekspor Kalbar** baik jenis komoditi/produk yang diekspor maupun negara tujuan ekspor melalui perbatasan; peningkatan peran ekspor UKM/IKM; pencitraan & promosi produk/komoditi daerah; Pengelolaan impor; serta mempersiapkan Kalbar sebagai Pusat Perdagangan Nasional pada akhir RPJPD Prov. Kalbar.
2. Mendorong **percepatan Revisi Permendag 35/1995** Penetapan sebagai pintu ekspor dan impor pada PPLB Entikong dan Badau serta Tempat Penimbunan sementara kepabeian (Bongkar muat) didukung percepatan pembangunan Terminal Barang Ekspor Impor pada PPLB tersebut dan secara bersamaan mendorong Pemerintah untuk mempercepat upaya-upaya ekspor melalui mekanisme goods in transit untuk komoditi CPO dan komoditi lainnya melalui pelabuhan di Sarawak – Malaysia.
3. **Menjaga stabilitas Inflasi Kelompok Bahan Makanan** melalui kegiatan-kegiatan untuk Menjaga stabilitas pasokan/stok dan harga. Hal tersebut dilaksanakan sejalan dengan perbaikan sistem logistik daerah dalam rangka menjamin terjaganya ketersediaan pasokan/stok dan fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting bagi masyarakat
4. **Memberikan publikasi dan edukasi** kepada masyarakat terhadap penggunaan produk dalam negeri; serta meningkatkan Pengawasan Barang Beredar terhadap barang dan jasa yang diperdagangkan baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri.

### E. Hal Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

**Belum ada** hal-hal lain yang perlu untuk dilaporkan oleh Dinas Perindag Prov. Kalbar pada Tahun 2018.

### F. Indikator Kinerja Kunci

#### F.1 Tataran Pengambil Kebijakan

Pada Tahun 2018 Pemerintah Daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan **Tidak Memperoleh** penghargaan dalam bentuk apapun.

#### F.2 Tataran Pelaksana Kebijakan;

##### 1) Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar terdiri dari dua urusan yaitu **urusan perindustrian** yang terdiri dari **1 (satu) program** (yaitu : Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah) dan **urusan Perdagangan** yang terdiri **2 (dua) program**

(yaitu : Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dan Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri).

Selanjutnya Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian adalah Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) dimana tidak terdapat SOP pelayanan urusan Perindustrian, tetapi ada untuk urusan perdagangan yaitu SOP Penerbitan SKA dan SOP Pengujian Mutu Barang dan Kalibrasi.

## 2) **Ketaatan Terhadap Peraturan Per Undang-Undangan**

**Tidak terdapat** PERDA yang harus dilaksanakan Dinas Perindag Prov. Kalbar menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM) pada Tahun 2018.

## 3) **Penataan Kelembagaan Daerah**

Pada Tahun 2018 organisasi Perindag Prov. Kalbar terdapat 16 Jabatan untuk urusan Industri dan telah terisi sebanyak 15- Jabatan atau 93,75% sedangkan untuk urusan Perdagangan terdapat 17 Jabatan untuk urusan Industri dan telah terisi sebanyak 15 Jabatan atau 88,24%.

Terdapat keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD dalam struktur organisasi SKPD yaitu untuk urusan industri Fungsional Penyuluh Industri (2 Orang), sedangkan pada urusan perdagangan adalah Fungsional penguji mutu barang (7 Orang) dan Fungsional arsiparis (2 Orang).

## 4) **Pengelolaan Kepegawaian Daerah**

Dalam hal pengelolaan kepegawaian daerah pada tahun 2018, Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD untuk urusan industri sebanyak 48 PNS atau 0,44% dari jumlah PNS PemProv Kalbar , sedangkan untuk urusan perdagangan sebanyak 68 PNS atau 0,63% dari jumlah PNS PemProv Kalbar (Total PNS Provinsi sebanyak 10.845 personil)

Selanjutnya dilihat dari Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan formal sesuai dengan tugasnya dimana Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 14 org untuk urusan industri 15 orang telah mengikuti diklat pim (terdapat 1 pejabat eselon IV yang belum mengikuti diklat pim), sedangkan untuk urusan perdagangan Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim sebanyak 15 PNS dan 15 PNS telah mengikuti diklatpim syarat jabatan masing-masing.

Sedangkan seluruh Pejabat di Dinas Perindag telah memenuhi persyaratan kepangkatan yaitu 15 Jabatan untuk urusan industri dan 15 Jabatan untuk urusan Perdagangan.



## 5) Perencanaan Pembangunan Daerah

Dilihat dari Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD, saat ini Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Dinas Perindag Provinsi Kalbar adalah lengkap (100%) yaitu terdapat 3 dokumen perencanaan berupa RENSTRA SKPD, RENJA SKPD, dan RKA SKPD.

Dilihat dari Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD, saat ini telah Sinkron seluruhnya (100%) antara Program RENJA SKPD TA. 2019 dengan Program RKA SKPD TA 2018 dan RPJMD 2013-2018. Demikian pula seluruh program pada RENJA-SKPD TA 2019 telah sinkron seluruhnya (100%) dengan RKA SKPD TA. 2018

Dalam Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran, Seluruh Program RENJA SKPD diakomodir dalam DPA SKPD (100%) dengan rincian Program RENJA SKPD urusan industri yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program dari Program dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program (100%); dan Program RENJA SKPD urusan perdagangan yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program dari Program dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program (100%).

## 6) Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. Dilihat dari Realisasi anggaran Dinas Perindag Prov Kalbar, Realisasi belanja OPD terhadap total belanja APBD menunjukkan Total realisasi belanja OPD **urusan industri** sebesar Rp. 4.178.925.014,- (belanja langsung) dari Total Belanja APBD, sebesar Rp.5.443.385.507.127,- atau sebesar 0,08%. Sedangkan Total realisasi belanja OPD **urusan Perdagangan**, sebesar Rp. 5.631.456.376,- (belanja langsung) dan Rp.12.761.239.094,- (belanja tidak langsung) atau total Rp.18.392.695.470,- dari Total Belanja APBD, sebesar Rp.5.443.385.507.127,- atau sebesar 0,34%.
- b. Dilihat dari Besaran belanja modal, **besaran belanja modal urusan industri** adalah sebesar Rp. 179.510.000,- dari Total Belanja OPD sebesar Rp. 22.571.620.484,- atau sebesar 0,80%. Untuk **belanja modal urusan perdagangan** adalah sebesar Rp. 767.111.600,- dari Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 30.535.802.372,- atau sebesar 3,40% dimana Belanja Modal Sekretariat Dinas masuk pada Urusan Perdagangan sebesar Rp. 143.502.000,-.
- c. Besaran **belanja pemeliharaan urusan industri** sebesar Rp. 41.938.804,- dari Total belanja barang dan jasa OPD sebesar Rp. 8.417.567.137,- atau sebesar 0,50%. Besaran **belanja pemeliharaan urusan perdagangan** sebesar Rp. 404.253.849,- dari Total belanja barang dan jasa SKPD, Rp. 8.417.567.137,- atau sebesar 4,80% dimana Belanja Pemeliharaan Sekretariat Dinas masuk pada Urusan Perdagangan sebesar Rp. 243.785.250,-

- d. Besaran **belanja pemeliharaan urusan industri** sebesar Rp. 41.938.804,- dari Total belanja OPD sebesar Rp. 22.571.620.484,- atau sebesar 0,19%. Besaran **belanja pemeliharaan urusan perdagangan** sebesar Rp. 404.253.849,- dari Total belanja OPD, Rp. 22.571.620.484,- atau sebesar 1,79% Belanja Pemeliharaan Sekretariat Dinas masuk pada Urusan Perdagangan sebesar Rp. 243.785.250,-
- e. Dalam rangka penerapan sistim akuntansi berbasis akrual, Keberadaan laporan keuangan Dinas Perindag Provinsi Kalbar telah lengkap melalui sistim SIMAKDA Pemprov Kalbar yang terdiri atas 7 (tujuh) jenis laporan keuangan, yaitu : 1. LRA, 2. Neraca, 3.CALK, 4. Perubahan SAL, 5. LO, 6. LPE, 7. LAK.

## 7) Pengelolaan Barang Milik Daerah

- a. Keberadaan inventarisasi barang atau asset Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar untuk manajemen aset dilaksanakan melalui penyusunan dokumen yang terdiri atas - Laporan Mutasi Barang, dan - Buku Inventaris.
- b. Dinas Perindag Prov. Kalbar menguasai 15 aset tanah dan bangunan dan 4 diantaranya tidak digunakan atau hanya 26,67% yang tidak digunakan.

## 8) Pemberian Fasilitas Terhadap partisipasi Masyarakat

- a. Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat yang terdapat pada Dinas Perindag Prov. Kalbar yaitu :
  - Leaflet pada setiap kegiatan pameran;
  - Billboard;
  - Papan Pengumuman SKPD di Dinas & UPT;
  - Kotak Saran (di Dinas dan UPT);
  - Website SKPD;
  - Sistem Informasi Promosi Industri Kalbar;
  - Papan Informasi Peta Spasial Industri Perdagangan;
  - Papan Informasi Visi Misi SKPD;
  - Papan Informasi Struktur Organisasi;
  - Papan Informasi Tupoksi
- b. Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Perindag Prov. Kalbar dilaksanakan melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) tentang penerbitan Surat Keterangan Asal ( SKA) dan SKM Pengujian Mutu Barang dan Kalibrasi.

### **F.3 Tataran Pelaksana Kebijakan (Urusan Pilihan)**

Capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan pilihan industri dan urusan pilihan perdagangan pada tahun 2018 Dinas Perindag Prov. Kalbar telah memberikan hasil yang cukup baik sesuai dengan data dari BPS Prov. Kalbar yaitu

#### **Urusan Industri :**

- Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB tahun 2018 sebesar Rp. 31,25 Triliun **(16,10 %)** dari total PDRB Prov. Kalbar sebesar Rp. 194,1 Triliun.
- Pertumbuhan Industri pada Tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar **2,7 %** apabila dibandingkan periode yang sama pada Tahun 2017.

#### **Urusan Perdagangan :**

- Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB triwulan III Tahun 2018 sebesar Rp. 27,33 Triliun **(14,08%)** dari total PDRB Prov. Kalbar sebesar Rp. 194,1 Triliun.
- EKSPOR BERSIH PERDAGANGAN pada Tahun 2018 sebesar **US\$ 463,07 juta**.

## BAB IV TUGAS PEMBANTUAN

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar dan UPT dibawahnya pada tahun 2018 **Tidak Melaksanakan** tugas pembantuan apapun.

## BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

### A. Kerjasama Antar Daerah

Pada Tahun 2018 Pemerintah Daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan **Tidak Melakukan** Kerjasama antar daerah.

### B. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga

Kerjasama daerah dengan pihak ketiga yang dilaksanakan Dinas Perindag Provinsi Kalimantan Barat dan masih berlaku sampai dengan 31 Desember 2018 adalah Perjanjian Kerja Sama antara Pemprov Kalbar dengan Kementerian Pertanian dengan Kementerian Perindustrian, dengan Institut Pertanian Bogor, dan Politeknik Negeri Pontianak dengan dasar surat sebagai berikut :

1. Nomor : 26/PK/EKON-BAPPEDA
2. Nomor : 690/HM.320/B/09/2014
3. Nomor : 224/IUBTT/9/2014
4. Nomor : 3923/IT3.6/DN/2014
5. Nomor : 3278/PL16/KS/2014

TENTANG Pembentukan Pengembangan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) Center untuk Mendukung Kawasan Usaha Agribisnis di Kalimantan Barat yang ditandatangani pada 23 September 2014 dan berlaku sampai dengan 23 September 2019.

### C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah

Dinas Perindag Prov. Kalbar melakukan kegiatan yang berkoordinasi dengan instansi vertikal di daerah terkait dengan pelaksanaan urusan pilihan industri dan perdagangan yaitu :

1. Kegiatan Monitoring dan Pembinaan Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat nomo : 109/DISPERINDAG/2018 tanggal 26 Januari 2018 Tentang Pembentukan Tim Terpadu Monitoring dan Pembinaan Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018. Instansi vertikal yang terlibat antara lain : Biro Perekonomian Setda Prov. Kalbar; Dinas Kesehatan Prov. Kalbar; Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalbar; Dinas Pangan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan Prov. Kalbar; Dinas Pariwisata Prov. Kalbar, Pemuda dan Olahraga Prov.

Kalbar, Dinas Perkebunan Prov. Kalbar, Polda Kalimantan Barat; Balai Besar POM Pontianak; Dirjen Bea Cukai Pontianak; Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pontianak; dan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak. Kegiatan ini dibiayai melalui Dana APBD sebesar Rp.55.612.500,-.

2. Kegiatan Monitoring Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 297/DISPERINDAG/2018 tanggal 15 Januari 2018 tentang Pembentukan Tim Monitoring Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019. Instansi vertikal yang terlibat antara lain : Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pontianak; Pelindo II Pontianak; Bulog Klbar; Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak; Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sambas; dan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini dibiayai melalui Dana APBD sebesar Rp. 76.250.000,-.
3. Kegiatan Penumbuhan dan Pembangunan Perwilayahan Industri Kalbar berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 137/DISPERINDAG/2018 Tanggal 13 Februari 2018 Tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Penumbuhan dan Pembangunan Perwilayahan Industri di Provinsi Kalimantan Barat. Instansi vertikal yang terlibat antara lain : Bappeda; Dinas PU; Dinas Pertambangan ESDM; Dinas Perhubungan; Dinas Perkebunan; Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura; Dinas Kehutanan; Dinas Perikanan dan Kelautan; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Biro Perekonomian; dan Biro Hukum. Kegiatan ini dibiayai melalui Dana APBD sebesar Rp. 226.920.750,-.

## BAB VI PENUTUP

Program dan Kegiatan TA. 2018 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat 2013 - 2018 dan Rencana Kerja 2018 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat. Program dan kegiatan tersebut disusun berdasarkan isu – isu strategis yang berkembang di Kalbar dan pencapaian target RPJMD Kalbar 2013 – 2018, dimana Program/Kegiatan yang direncanakan benar-benar memiliki output yang cepat dan dibutuhkan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2015-2019. Namun demikian, adanya pemotongan anggaran yang cukup besar serta adanya keterlambatan dalam pengesahan perubahan anggaran tahun 2018 cukup mempengaruhi pelaksanaan kegiatan, dimana beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan seluruhnya atau sebagian. namun demikian telah diupayakan semaksimal mungkin untuk tetap pada fokus pencapaian kinerja utama Dinas.

Diharapkan dengan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018 ini beserta kinerja yang dihasilkannya dapat berperan dalam menciptakan Kalbar menjadi daerah industri yang berdaya saing dan memiliki sistem perdagangan daerah yang kuat, yang merupakan kerja berat yang membutuhkan komitmen bersama dari pemerintah, dunia usaha dan segenap lapisan masyarakat sehingga mampu menggerakkan perkembangan percepatan ekonomi daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan. Harapan yang ingin dicapai dari pengembangan industri dan perdagangan ini yaitu untuk kedepan Kalimantan Barat dapat diarahkan menjadi daerah pusat industri baru nasional berbasis bahan baku lokal dan kuat strukturnya dan pusat perdagangan (distribusi) utama nasional di ALKI I pada akhir RPJPD 2028 dengan penekanan pada revitalisasi industri yang terstruktur kuat serta penguatan dan pengamanan perdagangan.